



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

KABUPATEN
PANGANDARAN

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 dapat selesai dengan baik dan lancar sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan demi peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKjIP ini, dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang lebih sejahtera.

Pangandaran, 24 Maret 2025
BUPATI PANGANDARAN,

Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 3

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran..... 4

 1.3.1 Letak Geografis Wilayah..... 4

 1.3.2 Kondisi Demografi..... 14

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran..... 18

 1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan..... 20

 1.4.2 Sumber daya Apratur Sipil Negara (ASN)..... 21

 1.4.3 Sumber daya Keuangan..... 22

1.5 Isu Strategis..... 27

1.6 Landasan Hukum..... 31

1.7 Sistematika Penyusunan LKJiP..... 33

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 34

2.1 Perencanaan Strategis..... 34

 2.1.1 Visi..... 35

 2.1.2 Misi..... 37

 2.1.3 Tujuan dan Sasaran..... 40

 2.1.4 Strategis dan Arah Kebijakan..... 48

2.2 Indikator Kinerja Utama..... 51

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun..... 54

2.4 Perjanjian Kinerja..... 54

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 57

3.1 Pengukuran Kinerja..... 58

3.2 Capaian Kinerja 59

 3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... 62

 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024..... 90

 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD..... 92

 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional..... 94

 3.2.5 Realisasi Anggaran..... 96

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran..... 98

BAB IV PENUTUP..... 100

4.1 PENUTUP..... 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran..... 5

Tabel 1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran..... 6

Tabel 1.3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran..... 7

Tabel 1.4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran..... 11

Tabel 1.5 DAS di Kabupaten Pangandaran..... 12

Tabel 1.6 Persentase Penyebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024..... 15

Tabel 1.7 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran..... 16

Tabel 1.8 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran..... 16

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran..... 17

Tabel 1.10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Tingkat Golongan..... 22

Tabel 1.11 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran 2019-2023..... 22

Tabel 1.12 Proyeksi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2024..... 25

Tabel 1.13 Detil Proyeksi Kebutuhan Anggaran untuk Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2024..... 26

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya..... 35

Tabel 2.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025..... 40

Tabel 2.3 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran..... 43

Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran 48

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026..... 51

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran..... 52

Tabel 2.7 Indikator Sasaran (*Impact*) Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Pangandaran..... 52

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2024..... 55

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja..... 59

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2024 59

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan 1..... 62

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1..... 62

Tabel 3.5 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 1..... 63

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2..... 64

Tabel 3.7 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 2..... 65

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tujuan 2..... 65

Tabel 3.9 Capaian kinerja sasaran strategis 3..... 66

Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran 3..... 67

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tujuan 3..... 68

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4..... 69

Tabel 3.13 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 4..... 70

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5..... 71

Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 5..... 72

Tabel 3.16 Capaian kinerja sasaran strategis 6..... 72

Tabel 3.17 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 6..... 73

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7..... 74

Tabel 3.19 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 7..... 74

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Tujuan strategis 4..... 75

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran strategis 8..... 75

Tabel 3.22 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 8..... 76

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaraan strategis 9..... 78

Tabel 3.24 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 9..... 78

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10..... 79

Tabel 3.26 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 10..... 79

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11..... 80

Tabel 3.28 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 11..... 81

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Tujuan 7..... 82

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran strategis 12..... 82

Tabel 3.31 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 12... 83

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13..... 84

Tabel 3.33 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 13..... 85

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Tujuan 6..... 86

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14..... 86

Tabel 3.36 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 14... 87

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15..... 87

Tabel 3.38 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 15... 88

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16..... 88

Tabel 3.40 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 16... 89

Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2023..... 90

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir RPJMD..... 93

Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi/ Standar Nasional..... 95

Tabel 3.44 Capaian Anggaran Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024..... 96

Tabel 3.45 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024..... 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat..... 4

Gambar 1.2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran..... 6

Gambar 1.3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran..... 9

Gambar 1.4 Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran..... 9

Gambar 1.5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran..... 11

Gambar 1.6 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran..... 13

Gambar 1.7 Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran..... 14

Gambar 1.8 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD..... 23

Gambar 1.9 Proyeksi Pengeluaran Kabupaten Pangandaran..... 24

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1..... 63

Gambar 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2..... 64

Gambar 3.3 Capaiankinerja Sasaran Strategis 3..... 66

Gambar 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4..... 69

Gambar 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5..... 71

Gambar 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6..... 73

Gambar 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8..... 76

Gambar 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9..... 78

Gambar 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10..... 79

Gambar 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11..... 81

Gambar 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12..... 83

Gambar 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13..... 85

Gambar 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14..... 86

Gambar 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15..... 88

Gambar 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16..... 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterbitkan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan SAKIP. Pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan yang efektif, efisien, dan akuntabel baik skala pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, di satu sisi mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kandungan SAKIP mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Tujuannya adalah Pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan pelayanan publik yang baik serta berkualitas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang berupa laporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas tersebut disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan pemerintah daerah. Laporan ini berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan gambaran terkait pencapaian kinerja dalam tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja. LKjIP Kabupaten Pangandaran disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini:

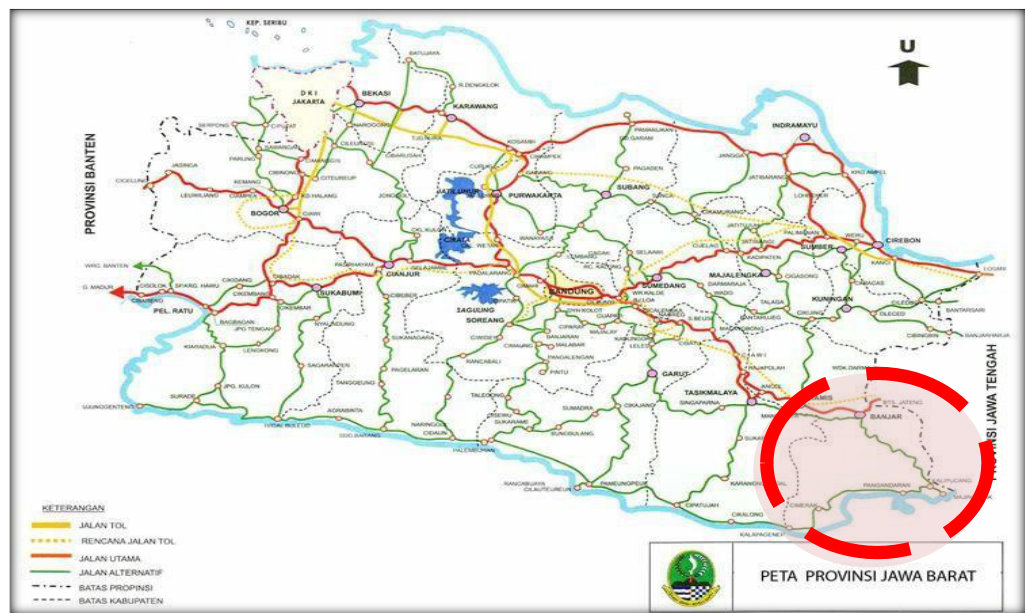
1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pangandaran atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten

Pangandaran dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

1.3.1 Letak Geografis Wilayah

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya dengan Kabupaten Cilacap.



Gambar 1. 1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, tahun 2010

Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Parigi
- b. Kecamatan Cijulang
- c. Kecamatan Cimerak
- d. Kecamatan Cigugur
- e. Kecamatan Langkaplancar
- f. Kecamatan Mangunjaya;
- g. Kecamatan Padaherang;
- h. Kecamatan Kalipucang;
- i. Kecamatan Pangandaran; dan
- j. Kecamatan Sidamulih.

Luas Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km², dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

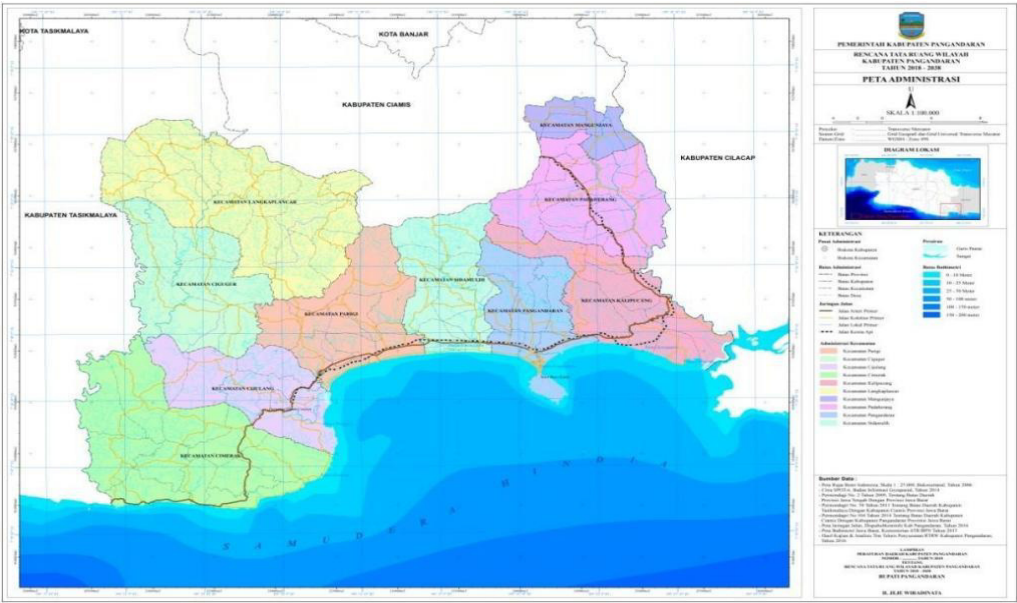
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Cimerak	190,22	11	51	99	357
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cigugur	117,82	7	39	64	200
4	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
5	Parigi	111,23	10	53	122	399
6	Sidamulih	90.47	7	33	68	263
7	Pangandaran	75,57	8	33	90	344
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Padaherang	112,76	14	60	142	443
10	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233
Jumlah		1.134,23	93	430	917	3.196

Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.



Gambar 1. 2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran

Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038

1.3.1.1 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 mdpl. Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi di dari selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebingcuram dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. • Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.
2	Cijulang	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	• Wilayah ini bukan pesisir melainkan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relative sama antara 400-1.000 mdpl.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
5	Parigi	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl • Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tinggi yakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	• Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. • Ketinggian: 3-500 mdpl.
8	Kalipucang	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). • Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	• Wilayah ini bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. • Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). • Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi tingkat kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawirsesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

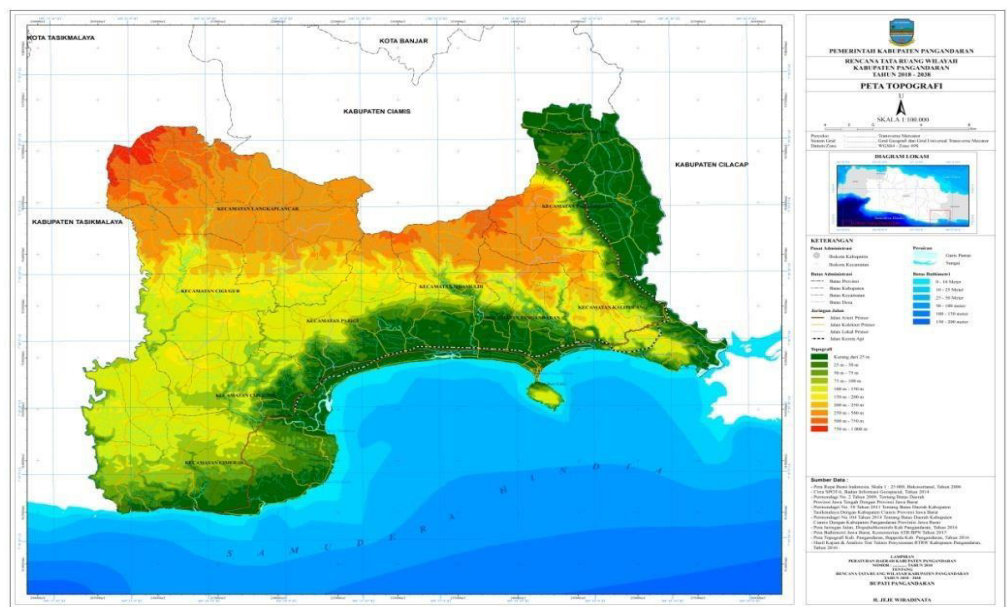
No	Kecamatan	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %.
2	Cijulang	• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %. • Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15 % - 25 %.

No	Kecamatan	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran
3	Cigugur	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40%terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2%-lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% • Terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2%-lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di Sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5%-lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrappingan.
9	Padaherang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 0%-40%. • Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0%-8%. • Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki • Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8%-lebihdari 40%.
10	Mangunjaya	• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desadengan kisaran kemiringan lereng antara 0%-5%.

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

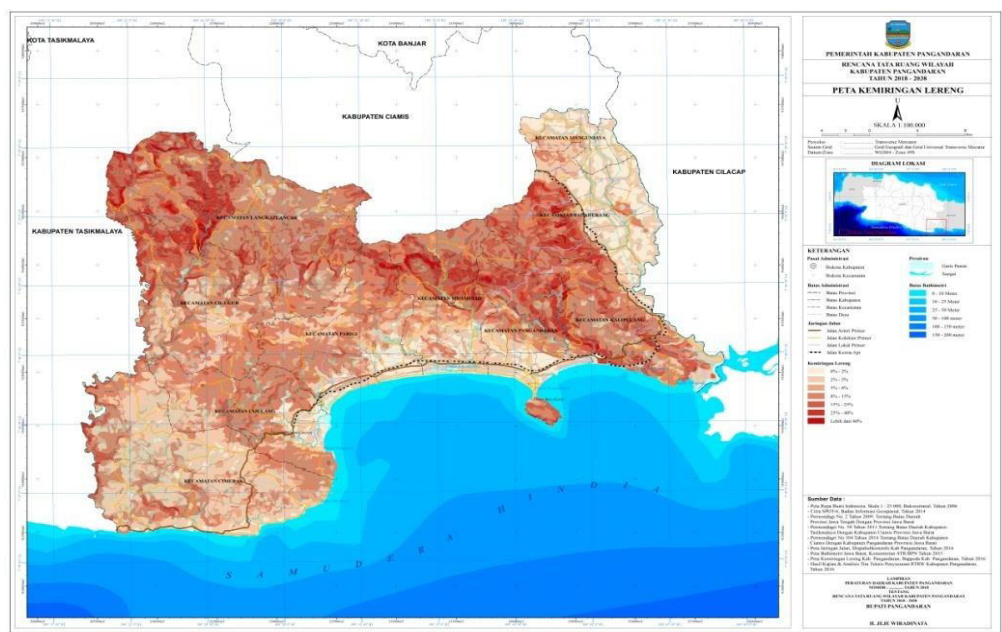
Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dijaga karena berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak dikelola dengan baik.

Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



Gambar 1. 4 Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

1.3.1.2 Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah- timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya

lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

- a. **Satuan Geologi Lingkungan Dataran:** Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng $<5\%$. Ketinggian antara 0-50 m diatas permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran-Parigi-Cijulang dan Kalipucang.
- b. **Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal:** Kemiringan lereng $>25\%$, ketinggian antara 100-700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar dibagian tengah memanjang kearah Barat Daya-Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air.

1. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalicupang

- Tanah lapukan berupa lempung pasiran-kerikilan, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka airtanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata airdebit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna airagak kekuningan.
- Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya hutan dan hutan lindung sebagai daerah resapan air dan sebagian baik untuk perkebunan tanaman keras per tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang- Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

2. Perbukitan Terjal Pananjung

- Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai objek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

- c. **Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping):** Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasiran,

permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke Utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagaia daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik.

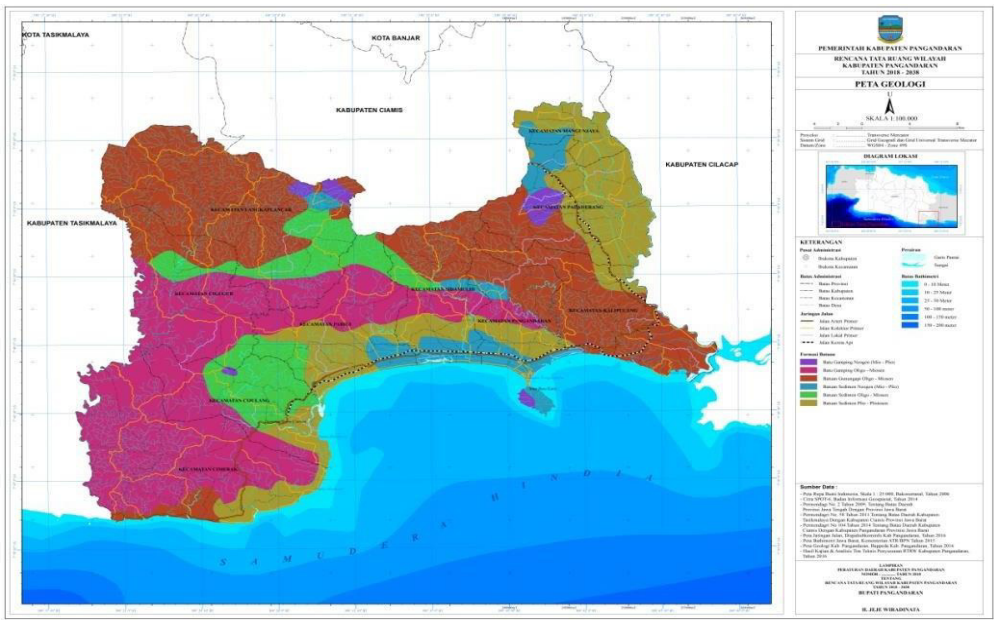
Tanah lapukan umumnya berupa lempung kerikilan yang sangat subur untuk pertanian lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang- tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi amblesan. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo – Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo – Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo – Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio – Plistosen	20.358,12
Total		113.324,15

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Peta sebaran geologi di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

1.3.1.3 Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai

Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran berada dalam 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciwulan - Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yangtercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 5 DAS di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
	Jumlah	113.325,11

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

- 1 Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, laba dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
- 2 Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10 ;V100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara2-9 m, pH berkisar antara 6-9 setempat menunjukkan angka yang cukup tinggi.Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksivulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2 l/detik hingga 20 l/detik bahkanada juga yang mencapai 100 l/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang danKecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemda yaitu:

1. Mata air Kalisodong Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guhahawu Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

Peta sebaran DAS di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

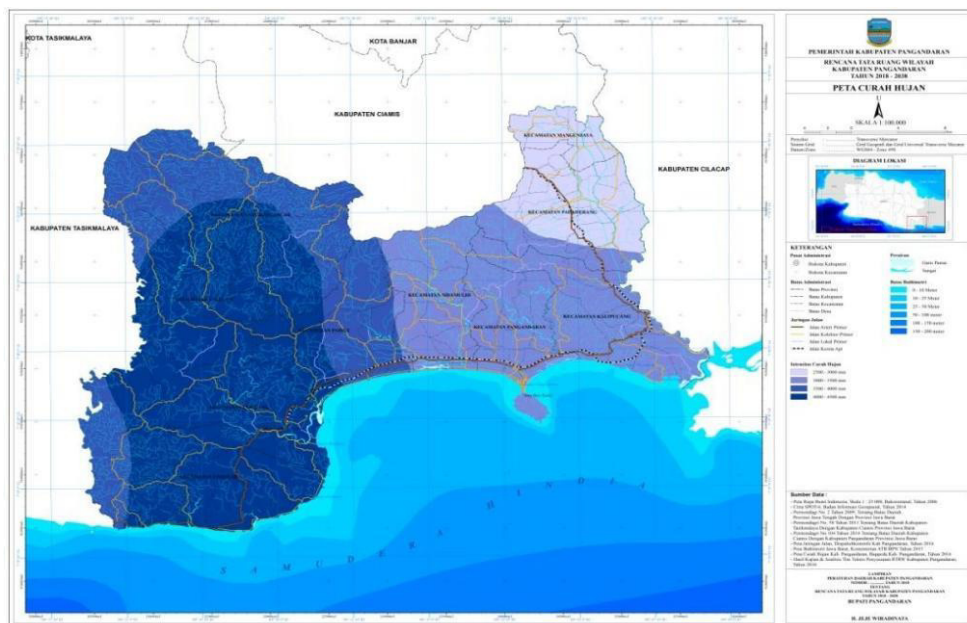
1.3.1.4 Kondisi Klimatologi

Secara umum Kabupaten Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30°C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.

Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.

Pada saat musim barat angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun

tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

1.3.2 Kondisi Demografi

Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk memegang peran yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

a. Perkembangan Kependudukan

Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2024, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 203,02 jiwa per kilometer persegi yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 117,82 kilometer persegi, dan kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 260,76 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.063,88 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan

Pangandaran dengan kepadatan 826,48 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 75,57 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 62.457 jiwa. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Tabel 1. 6 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(KM ²)	(Jiwa)	(Jiwa)
1	PARIGI	111,23	48.750	438,28
2	CIJULANG	94,37	28.435	301,31
3	CIMERAK	190,22	51.076	268,51
4	CIGUGUR	117,82	23.920	203,02
5	LANGKAPLANCAR	205,54	53.597	260,76
6	MANGUNJAYA	31,98	34.023	1063,88
7	PADAHERANG	112,76	71.407	633,27
8	KALIPUCANG	104,27	40.222	385,75
9	PANGANDARAN	75,57	62.457	826,48
10	SIDAMULIH	90,47	31.271	345,65
Jumlah		1.134,23	445.158	392,48

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (dependency ratio), hal tersebut dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.7 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024**

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	12.748	12.136	24.884
2	5-9	16.408	15.352	31.760
3	10-14	17.382	15.850	33.232
4	15-19	16.880	16.152	33.032
5	20-24	17.417	16.565	33.982
6	25-29	17.639	16.497	34.136
7	30-34	16.297	15.321	31.618
8	35-39	14.962	14.314	29.276
9	40-44	15.314	15.539	30.853
10	45-49	14.267	15.273	29.539
11	50-54	14.808	15.933	30.741
12	55-59	13.881	15.286	29.167
13	60-64	12.228	13.076	25.304
14	65-69	9.297	9.499	18.796
15	70-74	7.067	6.757	13.824
16	>75	6.826	8.188	15.014
Jumlah		223.421	221.737	445.158

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran 2024)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (dependency ratio) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang. Tabel di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk.

**Tabel 1.8 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024**

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif	Usia Tidak Produktif		Dependency Rasio
		(15-64)	0-14	65+	
1	Laki-laki	153.480	48.390	22.649	46,29
2	Perempuan	153.704	45.065	23,984	44,92
Jumlah		307.184	93.455	46.633	45,60

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Tahun 2024)

Tampak angka beban tanggungan telah kurang dari 50%. Hal ini berarti telah memasuki periode bonus demografi. Bila bonus demografi dimanfaatkan secara baik maka akan membuka window of opportunity. Kesempatan untuk mempercepat roda ekonomi menjadi lebih besar karena

berlimpahnya penduduk usia produktif. Namun, bila periode bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan maka bukan window of opportunity yang diperoleh tetapi yang ada bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas bisa jadi meningkat. Bonus demografi yang disertai pembangunan manusia akan memberi dampak besar bagi kemajuan daerah. Usia produktif secara bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Tersedianya lapangan kerja akan mencegah sumber daya manusia berpendidikan tinggi mencari dan pindah ke Kabupaten lain. Semakin banyak sumber daya manusia berkualitas tinggal di daerahnya maka keberhasilan pembangunan manusia semakin kentara. Terkait dengan besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turun dan naiknya angka IPM.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu faktor dalam IPM yaitu Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Makin banyak jumlah penduduk yang bersekolah dan menamatkan pendidikannya maka akan mendongkrak nilai Indeks Pendidikan. Untuk lebih jelasnya kondisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No	STATUS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak/Blm Sekolah	123.397
2	Belum Tamat SD/Sederajat	26.085
3	Tamat SD/Sederajat	160.623
4	SLTP/Sederajat	69.488
5	SLTA/Sederajat	50.522
6	Diploma I/II	1.563
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.785
8	Diploma IV/Strata I	12.046
9	Strata-II	719
10	Strata-III	35
JUMLAH		447.272

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan strata 1 sebanyak 12.046 orang, tingkat Diploma I dan II sebesar 1.563 orang, SLTA/Sederajat sebesar 50.522 orang dan SLTP/Sederajat sebesar 69.488 orang. Hal tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran mulai meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 123.397 orang yang terdiri dari penduduk usia belum sekolah (0-5 tahun) sebanyak 24.884 orang dan sisanya adalah penduduk usia sekolah sampai dengan usia dewasa namun belum mengenyam Pendidikan.

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan bupati Pangandaran tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Komposisi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sekertaris Daerah merupakan Sekertariat Daerah Tipe B;
- b. Sekertaris DPRD merupakan Sekertariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan, Kawasan Permukiman, Sub Urusan Pertamanan, dan Pemakaman;
11. Dinas Pertanian Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian;
12. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan-Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
14. Dinas Perhubungan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Tipe C melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
16. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

e. Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Bencana;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
2. Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
3. Kecamatan Cimerak dengan Tipe A;
4. Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
5. Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
6. Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
7. Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
8. Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
9. Kecamatan Sidamulih dengan Tipe A;
10. Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B.

1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
- b. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar yang meliputi:
 - 1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pangan
 - 4) Lingkungan Hidup
 - 5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 7) Perhubungan
 - 8) Komunikasi dan Informatika
 - 9) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 10) Penanaman Modal
 - 11) Kepemudaan dan Olahraga
 - 12) Kebudayaan dan Pariwisata
 - 13) Perpustakaan
- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - 1) Perikanan
 - 2) Pertanian
 - 3) Perdagangan

Di samping hal tersebut juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dilihat dari aspek Sumber daya aparatur (PNS), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Kabupaten Pangandaran pada adalah sebanyak 3.038 orang. Jumlah tersebut terdiri atas Golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 525 orang, golongan III sebanyak 1.924 orang dan golongan IV sebanyak 587 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah PNS Daerah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/d	2
2	II/a	6
3	II/b	3
4	II/c	304
5	II/d	212
6	III/a	530
7	III/b	541
8	III/c	258
9	III/d	595
10	IV/a	172
11	IV/b	375
12	IV/c	39
13	IV/d	1
Jumlah		3.038

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

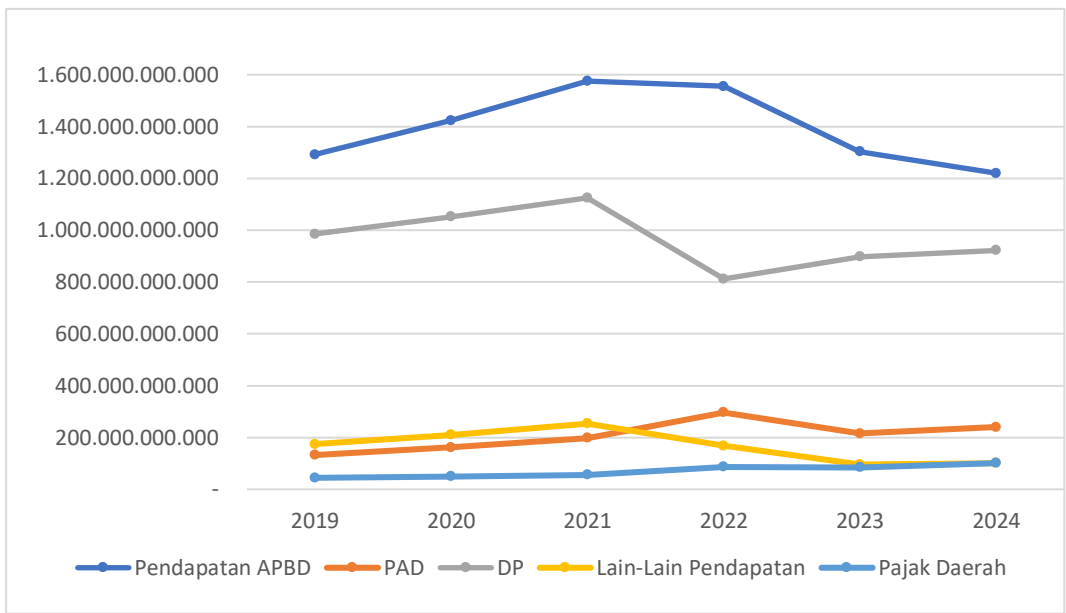
1.4.3 Sumber daya Keuangan

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang meliputi: anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk masa satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil dari model-model proyeksi pendapatan yang dikembangkan pada dokumen RPJMD, maka didapatkan hasil proyeksi komponen pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran periode 2019 – 2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 11 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran 2019-2024

Tahun	Pendapatan APBD	PAD	DP	Lain-Lain Pendapatan	Pajak Daerah
2019	1,291,462,891,843	132,278,055,964	985,496,915,267	173,687,920,612	44,387,749,745
2020	1,423,106,520,432	161,568,904,551	1,051,748,795,769	209,788,820,113	49,580,038,462
2021	1,575,288,394,030	197,345,740,587	1,124,549,389,886	253,393,263,557	55,379,698,858
2022	1,554,673,675.520	296,136,212,846	812,058,811,727	168,270,766,196	86,225,000,000
2023	1,302,690,603,923	215,022,163,013	898,017,571,000	95,955,000,000	84,181,889,613
2024	1,220,017,848,987	240,459,023,439	922,094,515,000	101,035,000,000	101,018,267,539

Gambar 1. 8 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran 2019-2024



Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata 10,4% di setiap tahunnya. Sementara dari tahun 2022 mengalami penurunan rata-rata sebesar 8% sampai tahun 2024.

Pendapatan PAD Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel 1.11 diatas menunjukkan kenaikan pendapatan PAD Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019-2021 sebesar 22,14% di setiap tahunnya. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 50,06% dari tahun sebelumnya. Tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 27,39% dan mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 11,83%.

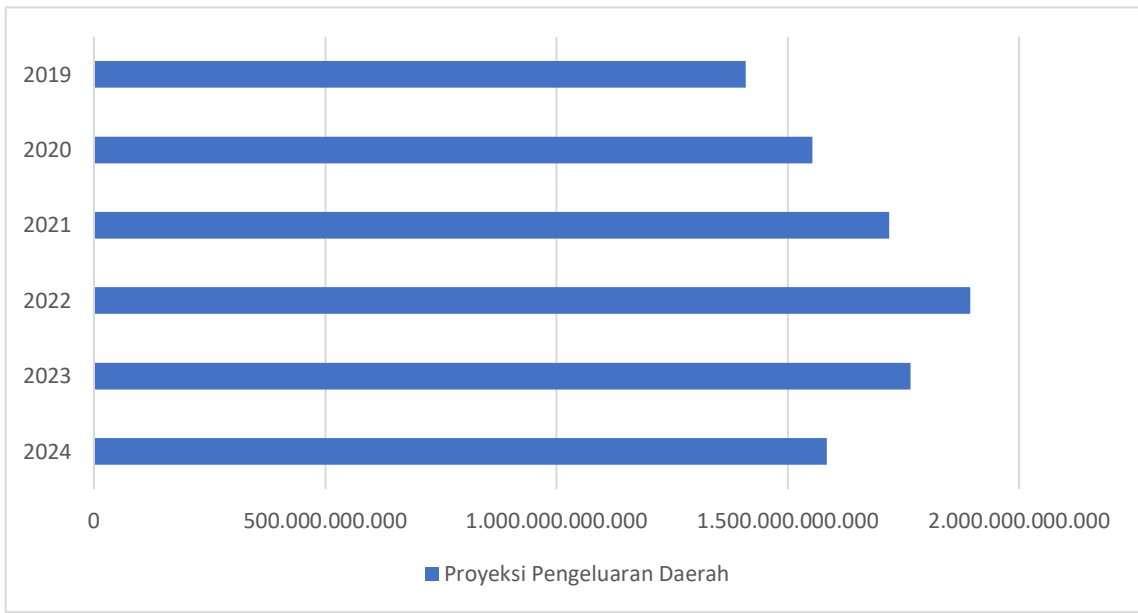
Pendapatan PAD akan mempengaruhi besarnya pendapatan Dana Perimbangan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan model regresi Dana Perimbangan didapatkan nilai pendapatan Dana Perimbangan di tahun 2019 sebesar Rp. 985.496.915.267 dan pendapatan Dana Perimbangan di tahun 2024 sebesar Rp. 922.094.515.000 dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 10,94%.

Dengan menjumlahkan semua komponen PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, maka didapatkan total pendapatan APBD di tahun 2019 sebesar Rp. 1.291.462.891.843,00 dengan peningkatan pendapatan yang cukup konsisten, sehingga diperkirakan total pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran di tahun 2024 adalah sebesar

Rp. 1.220.017.848.987.

Sementara itu Proyeksi Pengeluaran Daerah pada tahun 2019-2024 menggunakan asumsi bahwa rasio anggaran belanja terhadap penerimaan anggaran dan realisasi belanja terhadap anggaran memiliki kinerja sebagaimana tahun 2014 hingga 2015, maka proyeksi anggaran belanja Kabupaten Pangandaran selama 5 tahun ke depan adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.9

Gambar 1. 9 Proyeksi Pengeluaran Kabupaten Pangandaran 2019-2024



Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Dengan membagi klasifikasi belanja berdasarkan jenis Belanja Langsung dan Tidak Langsung, maka proyeksi belanja secara detil dapat diilustrasikan dengan Tabel 1.12 berikut ini. Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2024, dalam kolom Belanja menembus angka lebih dari 1 triliun rupiah. Kebutuhan belanja yang tinggi diantaranya adalah untuk alokasi belanja modal, yang besarnya sekitar 22% dari total anggaran belanja.

Tabel 1. 12 Proyeksi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2024

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja		1,304,111,589,877	1,332,879,857,778	1,362,312,454,938	1,895,098,261,143	1,765,209,967,458	1,584,017,848,987
Belanja Tidak Langsung		722,129,924,152	737,015,568,230	752,220,599,374			
1.1.	Belanja Pegawai	540,125,928,366	550,928,446,934	470,028,004,697	470,028,004,697	506,116,664,978	530,893,248,641
1.2.	Belanja Subsidi	7,758,361,700	7,991,112,551	-	-	-	-
1.3.	Belanja Bunga	-	-	10,470,585,500	10,470,585,500	13,600,000,000	32,500,000,000
1.4.	Belanja Hibah	6,339,648,809	6,561,536,517	29,479,355,500	29,479,355,500	35,639,951,524	32,948,709,250
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3,472,875,000	3,646,518,750	8,611,300,000	8,611,300,000	3,745,700,000	2,890,000,000
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	7,206,033,172	7,566,334,831	12,686,852,210 (5.4.01 Belanja Bagi Hasil)	12,686,852,210 (5.4.01 Belanja Bagi Hasil)	11,910,032,080 (5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan)	14,596,515,771
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	154,727,077,105	157,821,618,647	177,510,190,914 (5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan)	177,510,190,914 (5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan)	165,124,745,500	177,610,104,200
	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	287,197,000	287,197,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Belanja Langsung		581,981,665,725	595,864,289,548	610,091,855,564		-	
2.1.	Belanja Pegawai	30,205,811,163	31,111,985,498			-	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	194,093,239,778	199,916,036,971	661,614,805,679	661,614,805,679	630,931,643,065	438,681,872,134
2.3.	Belanja Modal	357,682,614,784	364,836,267,079	524,409,969,643	524,409,969,643	392,641,230,311	348,897,398,991

Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Dengan membagi anggaran belanja ke dalam empat pos utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanjatransfer diperoleh gambaran bahwa secara umum proyeksi belanja operasi akan memiliki kisaran porsi 66%. Di dalam belanja operasi tersebut, porsi belanja pegawai masih merupakan yang terbesar, yaitu sekitar 51% dari keseluruhan belanja operasi. Detail mengenai alokasianggaran belanja tersebut ditampilkan pada Tabel 1.13:

Tabel 1. 13 Detil Proyeksi Kebutuhan Anggaran untuk Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Belanja	1,304,111,589,877.00	1,332,879,857,778.00	1,362,312,454,938.00	1,895,098,261,143	1,304,111,589,877.00	1,584,017,848,987
Belanja Operasi	936,722,941,921	957,977,255,868	979,734,810,944	1,180,204,051,376	936,722,941,921	1,037,913,830,025
Belanja Pegawai	570,331,739,529	582,040,432,432	593,992,360,935	470,028,004,697	570,331,739,529	530,893,248,641
Belanja Barang dan Jasa	194,093,239,778	199,916,036,971	205,913,518,080	661,614,805,679	194,093,239,778	438,681,872,134
Belanja Bunga	-	-	-	10,470,585,500	-	32,500,000,000
Belanja Subsidi	7,758,361,700	7,991,112,551	8,230,845,927	-	7,758,361,700	-
Belanja Hibah	6,339,648,809	6,561,536,517	6,791,190,295	29,479,355,500	6,339,648,809	32,948,709,250
Belanja Bantuan Sosial	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,687	8,611,300,000	3,472,875,000	2,890,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	154,727,077,105	157,821,618,647	160,978,051,020	177,510,190,914	154,727,077,105	177,610,104,200
Belanja Modal	357,682,614,784	364,836,267,079	372,132,992,421	524,409,969,643	357,682,614,784	348,897,398,991
Belanja Tanah	-	-	-	80,000,000	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	164,432,697,755	-	23,480,232,575
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	69,844,116,630	-	51,532,893,600
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	286,128,292,193	-	268,222,547,616
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	2,000,000,000	-	5,000,000,000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	661,725,200
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	287,197,000	2,500,000,000	5,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	287,197,000	2,500,000,000	5,000,000,000
Belanja Transfer	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573	190,197,043,124	7,206,033,172	192,206,619,971
Belanja Bagi Hasil	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573	12,686,852,210	7,206,033,172	14,596,515,771

Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.5 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Beberapa isu strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 menggunakan analisis SWOT adalah:

1. Kekuatan

- a. Kabupaten Pangandaran memiliki Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang bervariasi.
- b. Garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama.
- c. Aktivitas pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi *leading sector* karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar.
- d. Sektor Pariwisata dipercaya bisa *sustainable* karena bisa diterima oleh kondisi masyarakat dan sesuai dengan kondisi lingkungan.

2. Kelemahan

- a. Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi
- b. Kebijakan pembangunan di daerah belum terakomodasi dengan sempurna.
- c. Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah
- d. Masih terdapat kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke Sebagian wilayah dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif.
- e. SDM Kabupaten Pangandaran perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pembangunan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan.
- f. Program kemitraan dengan masyarakat local masih kurang dilaksanakan dalam industry pariwisata.

3. Peluang

- a. Dalam RTRW Jawa Barat, Pangandaran sebagai Kawasan Andalan Nasional dengan pertanian, industry, perkebunan, pariwisata dan perikanan, pariwisata sebagai sektor unggulan.
- b. Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan Jabar.
- c. Implementasi MEA memberikan peluang pasar di regional dan internasional yang tinggi terhadap DTW pangandaran.
- d. Adanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran.

4. Ancaman

- a. Globalisasi membuat produk impor mudah masuk, sementara aktivitas perekonomian masyarakat dirasa belum mampu untuk bersaing.
- b. Kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi bisa menyebabkan berubahnya nilai-nilai social budaya dan kearifan local masyarakat di Kabupaten Pangandaran.
- c. Kondisi geografi Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana.
- d. DTW yang aktivitas pariwisatanya sudah berkembang berkorelasi dengan penurunan kualitas lingkungan di DTW tersebut, yang tidak menjamin keberlangsungan pembangunan wisata yang berkelanjutan.
- e. Ketidakstabilan perekonomian dunia memengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestic di Kabupaten Pangandaran.

Strategi SO ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan internal daerah agar dapat menarik keuntungan dari peluang eksternal yang mampu diambil oleh daerah. Strategi SO yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal diantaranya adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mampu mewujudkan tingkat pelayanan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sektor-sektor yang merupakan aktivitas kegiatan masyarakat terbesar, yaitu sektor pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan

2. Kondisi DTW yang ada, mampu menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional – sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia.
3. Mendorong kedewasaan dan kreatifitas ekonomi yang lebih besar, yang bisa dijadikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian kabupaten secara berkesinambungan dimasa yang akan datang, karena memiliki keterkaitan yang erat baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan kebelakang.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran akan tercipta dengan adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan kementrian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri.

Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal daerah dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang dapat diraihinya. Strategi WO yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal diantaranya adalah:

1. Agar dapat menangkap peluang sebagai daerah kawasan strategis pariwisata nasional dan juga sebagai daerah tujuan pariwisata skala internasional maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
2. Kemajuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan kepastian regulasi pengelolaan ruang dan lingkungan yang baik hingga ke tingkat yang lebih detail (zonasi). Oleh karenanya Pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran harus segera membuat rencana ruang hingga ketingkat detail, agar mampu mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
3. Implementasi MEA bisa meningkatkan peluang Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia. Kondisi ini hanya akan mampu diwujudkan dengan adanya dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung parawisata yang memadai dan juga pembangunan sumberdaya manusia yang sesuai dengan persyaratan daerah tujuanwisata kelas dunia.

4. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal

Strategi ST, bertujuan untuk menggunakan kekuatan yang ada di daerah untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal yang akan dihadapinya. Strategi ST yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Semangat untuk melayani masyarakat akan bisa mewujudkan kabupaten Pangandaran sebagai tempat pariwisata yang responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi dan mampu menjaga lingkungan agar dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Keistimewaan DTW Kabupaten Pangandaran, baik dari variasinya sebaran lokasi, maupun dukungan masyarakat nya, mampu dijadikan dasar untuk menjadi daya tarik wisatawan - baik asing maupun domestik - datang ke daerah ini meskipun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil.
3. Sektor Pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran didukung tidak saja oleh keindahan alam tetapi juga oleh keistimewaan budaya masyarakatnya diyakini bisa mencegah degradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokas masyarakat.
4. Keterkaitan yang besar antara aktivitas pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Pangandaran menjadi ciri khas perekonomian Kabupaten Pangandaran yang mampu bersaing dengan produk-produk impor yang masuk akibat meningkatnya globalisasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Strategi WT, merupakan bentuk dari strategi defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal yang ada dan akan dihadapi oleh daerah. Strategi WT yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Hal yang perlu dihindari oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah terhambatnya upaya untuk melakukan proses reformasi birokrasi pemerintah. Kondisi ini akan berdampak pada aktivitas andalan daerah yaitu pariwisata – berupa penanganan yang lambat terhadap potensi bencana sehingga memperkecil terwujudnya

sustainable tourism, hilangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah, serta terkikisnya budaya dan kearifan lokal. Apabila hal ini terjadi maka pariwisata di Kabupaten Pangandaran akan ditinggalkan oleh para wisatawan baik dari domestik maupun wisatawan mancanegara.

2. Sustainable tourism hanya akan bisa terwujud jika Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mampu meningkatkan penegakkan regulasi (law enforcement) di bidang tata ruang.
3. Peningkatan infrastruktur secara umum dan infrastruktur pariwisata secara khusus dan juga peningkatan sumberdaya manusia akan meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan – baik domestik maupun mancanegara.
4. Social acceptable dari aktivitas pariwisata menjadi prasyarat bagi terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan akan tercipta apabila ada kemitraan antara masyarakat dengan para pelaku di industri pariwisata.

1.6 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.7 Sistematika Penyusunan LKJIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah selama tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2024 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah setiap tahun terhadap rencana kinerja (*Performance Plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini menguraikan keberhasilan, hambatan, dan permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Pangandaran, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dasar Hukum Penyusunan LKJIP dan Sistematika Penyajian LKJIP.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2021-2026, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program prioritas pembangunan daerah dan indikator target sasaran prioritas pembangunan tahun 2024.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, pengukuran capaian hasil kinerja pemerintah tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kabupaten Pangandaran serta penjabaran akuntabilitas keuangan.
- BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, capaian kinerja serta permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya-upaya penyelesaiannya dan langkah serta solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang disampaikan oleh kepala daerah (Bupati). Perencanaan strategis Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan, program, serta kebijakan pembangunan daerah. RPJMD dalam substansinya memuat berbagai macam isu-isu strategis baik nasional maupun internasional, namun secara sistematis lebih berfokus memuat isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang efektif, fokus, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

Pada kurun waktu perencanaan tahun 2021-2026, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan sehingga membawa konsekuensi adanya peralihan beberapa urusan pemerintahan di daerah menjadi urusan pemerintahan di provinsi, antara lain pengelolaan pendidikan menengah dan urusan kehutanan. Selain itu, terjadi pula perubahan kebijakan di tingkat nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 59 Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya perubahan kelembagaan perangkat daerah di semua daerah. Sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah. Demikian pula di Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran. Sehingga Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran mengalami perubahan.

2.1.1 Visi

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran telah membuat visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 berdasarkan pada kondisi Kabupaten Pangandaran yang dapat dilihat dari peluang, tantangan, serta isu strategis yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah:

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Guna mengimplementasikan visi tersebut secara operasional, maka diperlukan penjabaran pada pokok-pokok visi berdasarkan penjelasannya. Adapun pokok-pokok visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (value) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai nilai kepribadian serta berupaya

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

2.1.2 Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, maka ditetapkan 6 (lima) misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama.

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilainilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tentram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah

kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan.

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Tabel 2.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025

MISI RPJMD 2021 – 2026	MISI RPJPD 2016 – 2025
Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama	Misi 2: Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius Misi 5: Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan local
Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur fasilitas yang berwawasan lingkungan
Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan	Misi 2: Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius
Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Misi 3: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Misi 1: Menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih
Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur fasilitas yang berwawasan lingkungan Misi 6: Menciptakan pembiayaan pembangunan daerah yang kolaboratif

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Visi misi yang telah tersusun diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan pada sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 Tujuan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

2.1.3.1. Tujuan dan sasaran Misi-1

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memperkuat nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama

- 2) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama

2.1.3.2. Tujuan dan sasaran Misi-2

Dalam rangka pencapaian misi Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata

2.1.3.3 Tujuan dan sasaran Misi-3

Dalam rangka pencapaian misi Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif
 - 2) Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi
 - 3) Melambatnya laju pertumbuhan penduduk
 - 4) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

2.1.3.4 Tujuan dan sasaran Misi-4

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 - 2) Meningkatnya permukiman layak huni
 - 3) Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
 - 4) Meningkatnya cakupan penanganan PPKS

2.1.3.5 Tujuan dan sasaran Misi-5

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive

2.1.3.6 Tujuan dan sasaran Misi-6

Dalam rangka pencapaian misi Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah
 - 2) Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 2.3 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama									
Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya local		Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	0,3048
		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	90
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7059	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	0,7770
Misi 2 : Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan									
Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan local		Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata	N/A	20	30	40	50	60	60
	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	720.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 3 : Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan									
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
		Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	79,08	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48	81,48
		Indeks Pendidikan	59,33	59,76	60,02	60,33	60,64	60,95	60,95
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	20,24
	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	N/A	5	7,5	10	12,5	15	15
	Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,76%	0,74%	0,73%	0,72%	0,71%	0,71%	0,71%
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal									
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50
		Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,33	6,75	6,17	5,58	5,00	5,00
	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	5,520
		Persentase Realisasi Nilai Investas	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38
		Rasio Kewirausahaan	2,54	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	4,50
		Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	73	74	74	74	74	75	75
	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	27	37	47	57	67	77	77
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel									
Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
		Nilai SAKIP	B	68	70	73	80	82	82
		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3
		Indeks SPBE	3,02	3	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
		Indeks Profesionalitas ASN	38,92	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	56,42
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15	3,06-3,15
Misi 6 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan									
Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
infrastruktur yang tangguh bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	1,865
		Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	54,64
	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	145	143	141	139	137	135	135
		Indeks Kapasitas Daerah	145,45	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,54	65,76	65,98	65,98	66,43	66,43

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2021-2026

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

2.1.4.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan serta diuraikan dalam tujuan dan sasaran, selanjutnya akan dicapai menggunakan strategi yang dianggap sesuai dengan upaya pencapaian masing-masing sasaran. Strategi untuk setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama			
Tujuan 1: Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya local	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga kamtibmas	Tahun Pertama: Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengurangan biaya produksi, Pemutusan rantai distribusi, inovasi TTG, pemberian bantuan bibit unggul, jaminan BPJS pada pelaku usaha resiko tinggi	
	Meningkatnya pelestarian budaya local	Revitalisasi pasar tradisional Pemda	
		Mengoptimalkan kelembagaan	
		Pembangunan lumbung pangan baru	
		Penyediaan lahan untuk membangun gedung kesenian (pusat budaya)	
Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan			
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan local	Sasaran 2.1: Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada	
		Melanjutkan penataan kawasan destinasi wisata yang sudah ada	
		Pembukaan rute penerbangan, simpul transportasi, dan pembukaan trayek	
		Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penetapan ciri khas tata bangunan/ arsitektur gedung dan bangunan	
		Pemenuhan sarpras dan pelayanan sesuai GSTC	
		Peningkatan pelayanan pariwisata	
		Mengundang investor penyelenggaraan wisata	
Misi 3 Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan			
Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Sasaran 3.1: Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi dokter PNS	
		Pembentukan Perda	
		Integrasi/ perluasan cakupan JKN	Tahun Keempat: Peningkatan Daya Saing Daerah
		Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas	
		Pembayaran JKN oleh Pemda untuk para Lansia	
	Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan	
	Sasaran 3.3: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui Program Keluarga Berencana	
	Sasaran 3.4: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan	
Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi local			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4.1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat	
	Sasaran 4.2: Meningkatnya permukiman layak huni	Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah	
	Sasaran 4.3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Pemberian beasiswa bagi guru yang belum S1	
	Sasaran 4.4: Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningka - tan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS	
Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel			
Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan	Tahun Kelima: Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi
	Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Implementasi OSS	
Misi 6 Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan			
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Tahun Ketiga: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
	Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan	
		Membangun sarana dan prasarana perkantoran	
		Meningkatkan akses air minum dan sanitasi	
		Menyelenggarakan pelatihan,mitigasi kebencanaan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

2.1.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 beserta keterkaitannya dengan rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dipilih sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 yaitu “Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi”.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama, berdasarkan PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran

NO	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
2	Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	N/A	20	30	40	50	60	60
3	Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
4	Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50
6	Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0
7	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Tabel 2.7 Indikator Sasaran (Impact) Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama								
Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00	Kesbangpol
Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	0,3048	Satpol-PP, BPBD
Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	90	Kesbangpol
Indeks Desa Membangun	0,7059	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	0,7770	DinsosPM D
Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan								
Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	N/A	20	30	40	50	60	60	Disparbud
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	720.000	Disparbud
Misi 3 Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan								

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00	BPS
Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12		
Indeks Kesehatan	79,08	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48	81,48	Dinkes
Indeks Pendidikan	59,33	59,76	60,02	60,33	60,64	60,95	60,95	Disdikpora
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	20,24	Dispusip
Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan	N/A	38	38	40	40	45	45	Disdikpora
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59	Dkbp3a
Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61	Dkbp3a
Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi local								
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50	BPS
Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0	DinsosPM D
PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	5,520	Dinas Pertanian
Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38	DPMPTSP
Rasio Kewirausahaan	2,54	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	4,50	DKUKMPP
Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5	DKPKP
Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	73	74	74	74	74	75	75	DPUPRTRKP
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50	Disnaker
Persentase PPKS yang Mandiri	27	37	47	57	67	77	77	DinsosPM D
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel								
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A	Setda
Nilai SAKIP	B	68	70	73	80	82	82	Bappeda
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
Nilai LKE Kabupaten/Kota	CC	B	BB	A	A	AA	AA	Inspektorat
Indeks SPBE	3,02	3	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25	Diskominfo
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	BKAD
Indeks Profesionalitas ASN	38,92	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	56,42	Bkpsdm
Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15	3,06-3,15	Disdukcapil
Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan								
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84	DPUPRTRKP
Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	1,865	DPUTRPRKP
Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	54,64	Dishub
Indeks Risiko Bencana	145	143	141	139	137	135	135	BPBD
Indeks Kapasitas Daerah	145,45	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44	Dinsospmd
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,54	65,76	65,98	66,20	66,43	66,43	DLHK

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *outcome* dan *output* yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada suatu tahun tertentu. RKT diperlukan agar dalam penyusunan RKPD fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen Bupati yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		2024
Misi 1 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama		
Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2579
	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	85
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7693
Misi 2 : Mengembangkan Wisata Dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan		
Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	690.000
Misi 3 : Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan Dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Peningkatan Kompetensi Lulusan		
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,68
	Indeks Pendidikan	60,33
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,61
Meningkatkan Jumlah Pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	40
Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,57%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,59
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal		
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,109
	Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,60
	Rasio Kewirausahaan	4,15
	Indeks Ketahanan Pangan	83,50

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		2024
Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80 - 4,00
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	57
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel		
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	73
	Tingkat Maturitas SPIP	3
	Indeks SPBE	3,1
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,00
	Indeks Profesionalitas ASN	49,42
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	Indeks Pelayanan Publik	2,86 - 2,95
Misi 6 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan		
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,808
	Persentase cakupan layanan infrastruktur	48,28
Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	139
	Indeks Kapasitas Daerah	139,2
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,98

Sumber: Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran, Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sudah menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja dan realisasi kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya. Capaian atas kinerja instansi pemerintah perlu menjelaskan pula terkait sumber daya yang mendukung keberhasilan ataupun ketidakberhasilan, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tertuang pada dokumen perencanaan. Pada konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan

target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (realisasi positif), maka digunakan rumus sebagai berikut: $\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (realiasi negatif), maka digunakan rumus sebagai berikut: $\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indikator), maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode composite (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator).

Hasil nilai composite ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada di dalam kelompok tersebut. Maka, disimpulkan nilai capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan kelompok indikator adalah sebagai berikut:

Capaian rata – rata kinerja

=
$$\frac{\text{Jumlah Persentase (\%) Capaian seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Setiap Sasaran}}$$

Hasil dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3 .1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja 2024

Pengukuran capaian kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	Indeks Kesalehan Sosial	62,00	Nilai belum rilis	-	-
2.	S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2579	0,4024	156%	Sangat Tinggi
3		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	85	90,6	107%	Sangat Tinggi
4	S2.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7693	0,8493	110,4%	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
5	T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	40	62	155%	Sangat Tinggi
6	S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	690.000	2.006.906,08	290.86%	Sangat Tinggi
7	T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	69,59-70,06	71,03	103%	Sangat Tinggi
8		Indeks Pembangunan Gender	90,07	Nilai belum rilis	-	-
9	S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,68	84,78	104,67%	Sangat Tinggi
10		Indeks Pendidikan	60,33	61,19	101,43%	Sangat Tinggi
11		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,61	77,16	393%	Sangat Tinggi
12	S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	40	47	118%	Sangat Tinggi
13	S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,57	0,61	107%	Sangat Tinggi
14	S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,59	Nilai belum rilis	-	-
15	T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,82	5,12	93%	Sangat Tinggi
16		Persentase Penduduk Miskin	6,5-6,0	8,75	148%	Sangat Tinggi
17	S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian,Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,109	7,7122	151%	Sangat Tinggi
18		Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,60	-0,17	-2%	
19		Rasio Kewirausahaan	4,15	9,14	220%	Sangat Tinggi
20		Indeks Ketahanan Pangan	83,5	83,86	100,4%	Sangat Tinggi
21	S.9 Meningkatnya	Persentase Rumah Layak Huni	74	88,28	119%	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
	permukiman layak huni					
22	S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80-4,00	1,58	304%	Sangat Tinggi
23	S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	57	110,38	193,65%	Sangat Tinggi
24	T.5 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	Indeks Reformasi Birokrasi	69-73	76,32	106%	Sangat Tinggi
25	S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	73	67,98	93%	Sangat Tinggi
26		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	Sangat Tinggi
27		Indeks SPBE	3,1	3,56	114,84%	Sangat Tinggi
28		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,00	57,66	79%	Tinggi
29		Indeks Profesionalitas ASN	49,42	79,65	161,16%	Sangat Tinggi
30	S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publi	2,86-2,95	4,44	155%	Sangat Tinggi
31	T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	79,05	85,70	108%	Sangat Tinggi
32	S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,808	1,731	95,74%	Sangat Tinggi
33		Persentase cakupan layanan infrastruktur	48,28	71,27	148%	Sangat Tinggi
34	S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	139	147,85	106%	Sangat Tinggi
35		Indeks Kapasitas Daerah	139,2	133,13	96%	Sangat Tinggi
36	S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,98	58,99	89,41%	Sangat Tinggi

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Misi 1:

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

Tujuan 1:

Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal

Tabel 3 .3 Capaian Kinerja Tujuan 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesalehan Sosial	61	Nilai belum rilis	-	-

Sumber data: Satpol-PP, Bakesbangpol

Indeks ini menggambarkan tingkat kesalehan sosial umat beragama. Metode analisa penyusunan IKS menggunakan analisa melalui Survei terhadap dimensi yang meliputi Kepedulian Sosial, Relasi Antar Manusia, Etika dan Budi Pekerti, Melestarikan Lingkungan dan Patuh pada Peraturan Negara. Analisa ini mengukur hubungan antara pengetahuan dengan sikap atau perilaku.

Sasaran 1 :

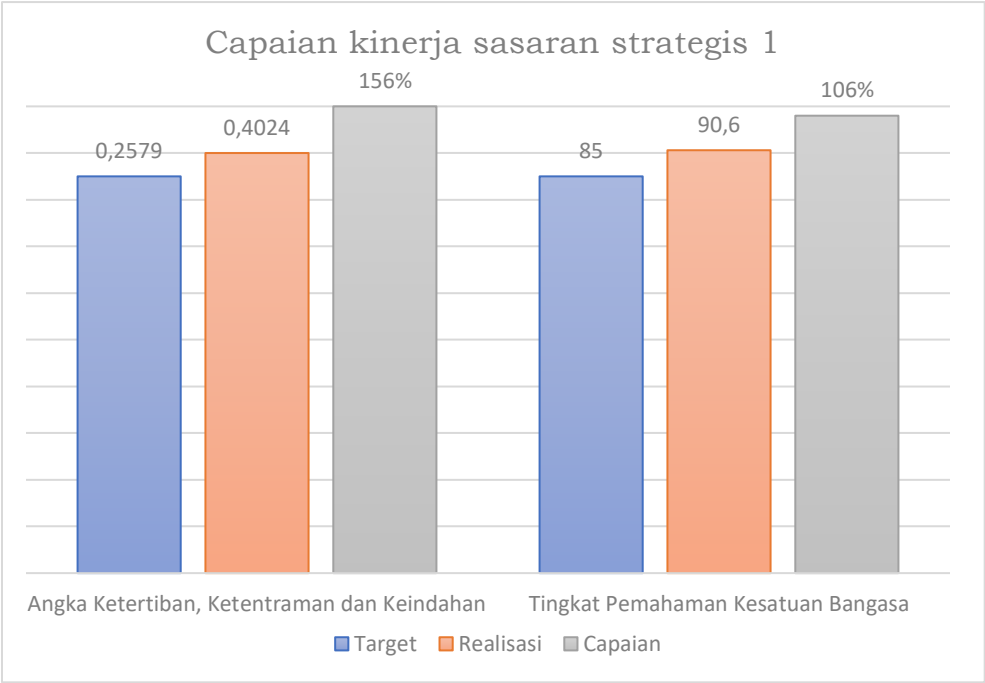
Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin tolerasni dan kerukunan umat beragama.

Tabel 3 .4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Ketertiban,Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2579	0,4024	156%	Sangat Tinggi
Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	85	90,6	107%	Sangat Tinggi

Sumber data: Satpol-PP, Bakesbangpol

Capaian Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani telah dijelaskan pada tabel diatas adalah 156% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,2579 dan terealisasi sebesar 0,4024. Realisasi telah melebihi target. Selanjutnya Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa mempunyai nilai capaian 106% dari target 85 dan terealisasi sebesar 90,6.



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sumber data: Satpol-PP, Bakesbangpol

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 1

No	Nama Program	PD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol-PP	20.172.587.915	19.004.419.128	94,21
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol-PP	661.200.000	543.602.700	82,21
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	801.473.640	695.596.420	86,79
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bakesbangpol	229.935.350	177.289.350	77,10
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	1.386.435.116	1.349.679.000	97,35
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol	30.808.524.905	30.770.552.605	99,88
7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	Bakesbangpol	30.000.000	12.500.000	41,67
Jumlah			54.090.156.926	52.553.639.203	97,16

Sumber data : Satpol-PP, Bakesbangpol

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Banyaknya laporan dari masyarakat;
- 2) Respon cepat anggota yang bertugas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Jumlah personil, sarana dan prasarana yang terbatas;
- 4) Jarak tempuh ke tempat kejadian yang cukup jauh sehingga kebakaran tidak tertangani;
- 5) Ada kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi pembayaran pada tahun selanjutnya

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran sesuai dengan target akhir RPJMD diperlukan upaya sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target serta optimalisasi penanganan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan;
- 2) Optimalisasi penanganan kebakaran;
- 3) Penundaan pembayaran dan di bayarkan tahun selanjutnya

Sasaran 2 :

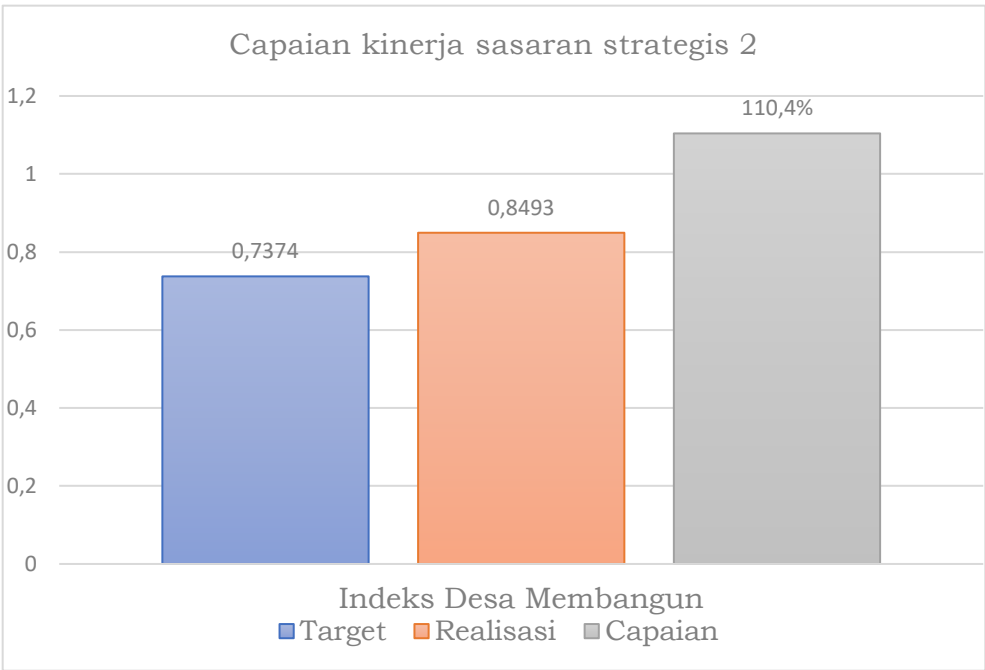
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa

Tabel 3 .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Desa Membangun	0,7374	0,8493	110,4%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indeks Desa Membangun yang telah dijelaskan pada tabel diatas adalah 110,4% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,7374 dan terealisasi sebesar 0,8493.



Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2

Sumber data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran 2

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DinsosPMD	249.706.600	133.371.400	53,41
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DinsosPMD	1.475.172.947	1.237.565.500	83,89
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	DinsosPMD	113.000.000	54.000.000	47,79
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	DinsosPMD	236.477.663	192.440.745	81,38
5	Program Penataan Desa	DinsosPMD	20.000.000	19.999.500	99,99
Jumlah			2.094.357.210	1.637.377.145	78,19

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah setelah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa mampu menganalisa Indek Kompositnya yang lemah sehingga Pemerintah Desa dalam menyusun arah pembangunannya difokuskan pada peningkatan indek komposit.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Optimalisasi Pembinaan Pemerintah Desa.

Misi 2:

Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Tujuan 2 :

Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tabel 3 .8 Capaian Kinerja Tujuan 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	40	62	155%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dibuat untuk memberikan pemahaman bersama tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria Destinasi GSTC – secara informal dikenal sebagai “GSTC-D” – merupakan kriteria minimum yang seyogianya ingin dicapai oleh setiap destinasi pariwisata. Kriteria GSTC-D ini tersusun ke dalam empat tema: pengelolaan berkelanjutan; dampak sosial-ekonomi; dampak budaya; dan dampak lingkungan. Kriteria-kriteria itu dapat diterapkan pada semua sektor pariwisata.

Sasaran 3 :

Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata

Tabel 3 .9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	690.000	2.006.906,08	290,8%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Target Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan adalah sebesar 690.000 realisasi 2.006.906,08 dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 290,8%



Gambar 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .10 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran 3

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud	74.951.624.513	52.207.413.822	69,65
2	Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud	433.768.636	69.256.656	15,97
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparbud	30.975.400	12.720.564	41,07
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud	219.274.269	87.446.000	39,88
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud	600.002.800	278.044.202	46,34
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud	63.930.460	33.330.564	52,14
Jumlah			76.299.576.078	52.688.211.808	69,05

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah

- 1. Sebagian kegiatan dan program tidak dilaksanakan
- 2. Kekurangan Tim Ahli Cagar Budaya sehingga penetapan tidak bisa dilaksanakan

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah

- 1. Perencanaan dan Penganggaran disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- 2. Kegiatan kembali di rencanakan dan lebih dipersiapkan terkait teknis kegiatannya.

Misi 3:

Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan

Tujuan 3 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

Tabel 3 .11 Capaian Kinerja Tujuan 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Manusia	69,59-70,06	71,03	103%	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Gender	90,06-90,09	Nilai belum rilis	-	-

Sumber data: DKBP3A

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-ratalama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator GNI per kapita.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

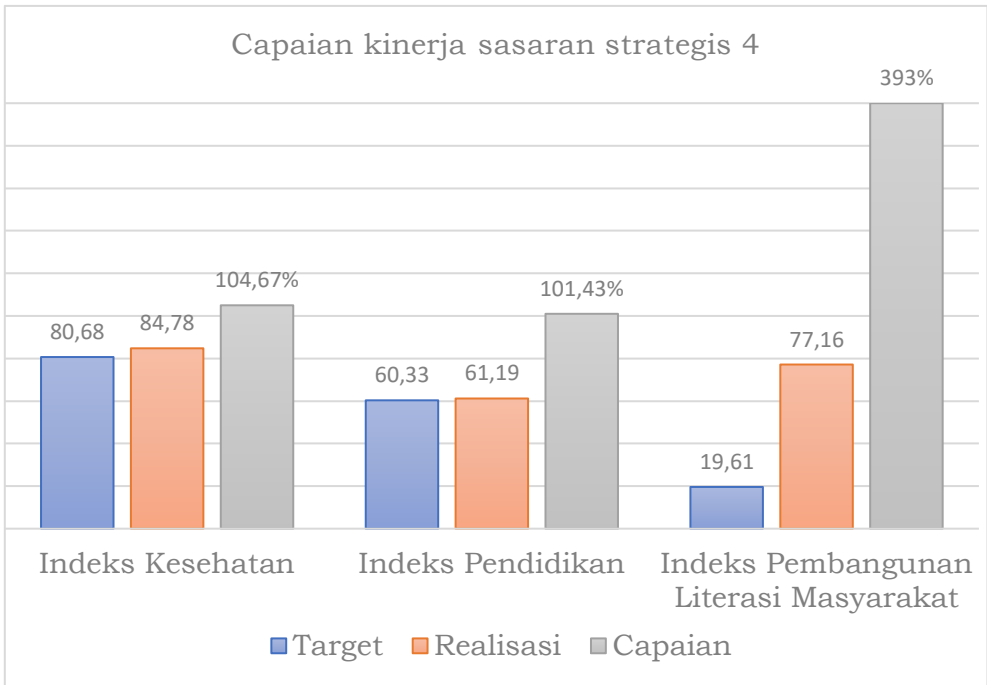
Sasaran 4 :
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif

Tabel 3 .12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	80,51-81,00	84,78	104,6%	Sangat Tinggi
Indeks Pendidikan	60,21-60,50	61,19	101,4%	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,61	77,16	393%	Sangat Tinggi

Sumber data:Dinas Kesehatan,Disdikpora,Dispusip

Capaian Indeks Kesehatan yang telah dijelaskan pada table diatas adalah 104,6% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,51-81,00 dan terealisasi sebesar 84,78. Capaian indeks Pendidikan diatas adalah 101,4% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60,21-60,50 dan terealisasi sebesar 61,19 sedangkan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diatas adalah 393% dari target yang telah ditetapkan sebesar 19,61 dan teralisasi sebesar 77,16.



Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sumber: Dinas Kesehatan,Disdikpora,Dispusip

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3 .13 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran
Strategis 4**

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	106.980.049.159	69.828.960.895	65,27
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	6.451.559.324	1.160.755.475	17,99
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	200.000.000	18.057.000	9,03
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	247.547.662.985	136.589.500.203	55,18
5	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikpora	727.999.251	343.093.695	47,13
6	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Disdikpora	3.643.896.800	3.045.896.800	83,59
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Dispusip	530.310.711	135.249.667	25,50
Jumlah			366.081.478.230	211.121.513.735	57,67

Sumber data : Dinas Kesehatan,Disdikpora,Dispusip

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Faktor ketercapaian Indek Pendidikan yaitu meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- 2) Adanya efisiensi anggaran dan mengutamakan kegiatan yang lebih prioritas;
- 3) Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi/promosi tidak tercapai karena kunjungan menurun, maka berdampak kepada kegiatan sosialisasi.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain adalah:

- 1) Tingkat kunjungan menurun salah satu solusi nya adalah dengan menambah armada Perpustakaan Keliling;

- 2) Kegiatan sosialisasi menurun bisa diatasi dengan sosialisasi langsung door to door ke tiap-tiap perpustakaan dan komunitas baca yang ada di Kabupaten Pangandaran;
- 3) Meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan peserta didik kesetaraan baik itu Paket A, Paket B dan Paket C.

Sasaran 5 :

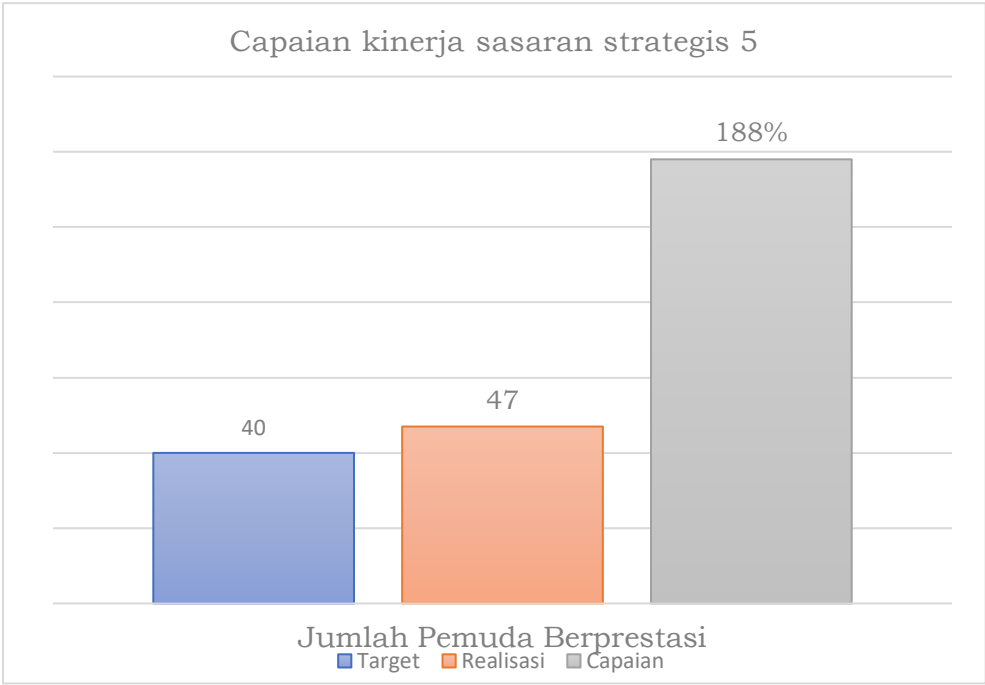
Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi

Tabel 3 .14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	40	47	118%	Sangat tinggi

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Capaian sasaran Strategis 5 berkaitan dengan Jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan adalah sebesar 118%. Realisasi kinerja jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan adalah sebesar 47 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 40 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 118%.



Gambar 3 .5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .15 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 5

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	1.363.597.668	713.597.668	52,33
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	11.868.779.256	11.072.893.856	93,29
Jumlah			13.232.376.924	11.786.491.524	89,07

Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kurangnya pembinaan olahraga;
- 2) Kurangnya Event/Kejuaraan tingkat Kabupaten;
- 3) Kurangnya cabang olahraga yang diikuti.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain adalah:

- 1) Memasyarakatkan cabang olahraga yang lainnya;
- 2) Melakukan pembinaan sejak dini;
- 3) Mengadakan kejuaraan berjenjang dan berkesinambungan.

Sasaran 6 :

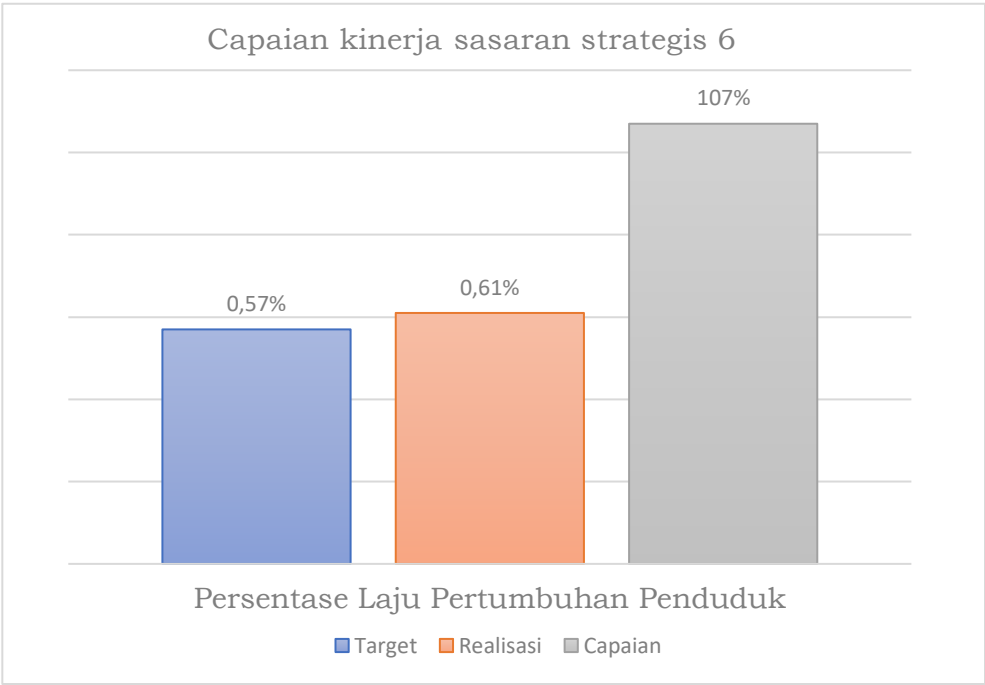
Melambatnya laju pertumbuhan penduduk

Tabel 3 .16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,57%	0,61%	107%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian sasaran Strategis 6 berkaitan dengan Persentase laju pertumbuhan penduduk adalah Realisasi kinerja Persentase laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,61% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 0,57% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 107% atau Sangat Tinggi.



Gambar 3 .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Sumber data: DKBP3A,Disdukcapil

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .17 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 6

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Penduduk	DKBP3A	424.150.000	363.037.469	85,59
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DKBP3A	3.089.930.700	2.419.160.700	78,29
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DKBP3A	2.125.989.000	2.091.276.200	98,37
4	ProgramPendaftaran Penduduk	Disdukcapil	445.730.000	206.500.000	46,33
5	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil	170.355.562	94.600.000	55,53
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	70.623.674	28.100.000	39,79
Jumlah			6.326.778.936	5.202.674.369	82,23

Sumber data: DKBP3A, Disdukcapil

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Realisasasi belanja seusai tagihan real, adanya penyesuaian pembayaran dengan kondisi keuangan;
- 2) Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran
- 2) Kontrak dibuat sejak awal tahun

Sasaran 7 :

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Tabel 3 .18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	74,58%	Nilai belum rilis	-	-

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian sasaran Strategis 7 berkaitan dengan Indeks Pemberdayaan Gender adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesetaraan akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pangandaran tahun 2024 belum rills dari BPS.

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .19 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 7

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DKBP3A	186.837.720	159.257.720	85,24
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DKBP3A	280.183.600	10.183.600	3,63
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DKBP3A	68.040.000	37.046.228	54,45
4	Program Perlindungan Perempuan	DKBP3A	21.290.380	12.211.280	57,36
Jumlah			556.351.700	218.698.828	39,31

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Penyesuaian pembayaran dengan kondisi keuangan.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Misi 4 :

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Tujuan 4 :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3 .20 Capaian Kinerja Tujuan 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,51	5,12	93%	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk Miskin	5,90	8,75	133%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran 8 :

Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

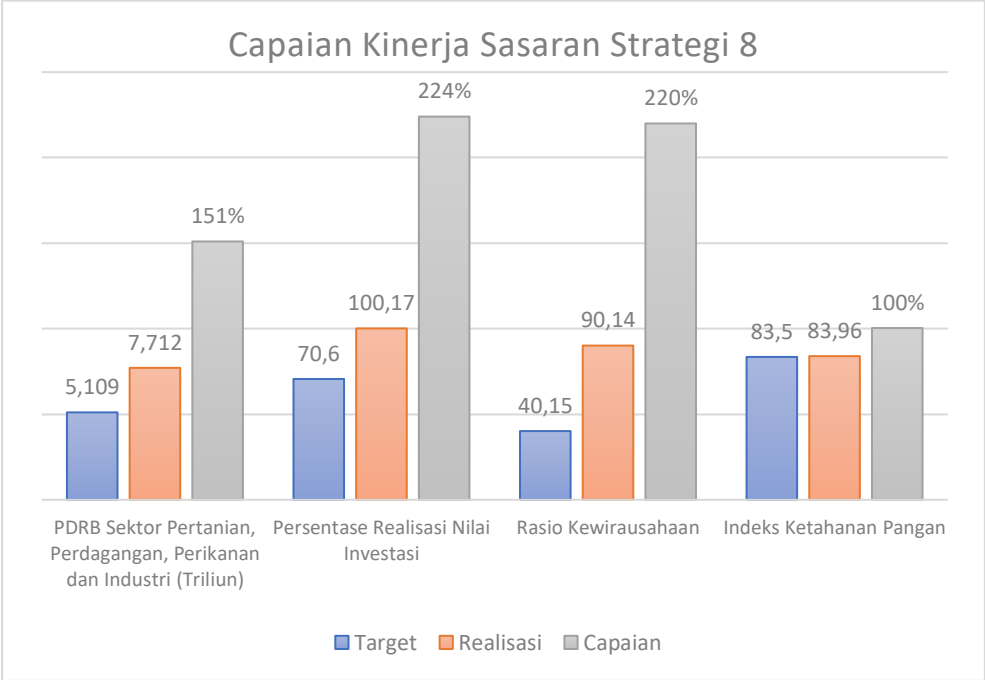
Tabel 3 .21 Capaian kinerja sasaran strategis 8

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,109	7,712	151%	Sangat Tinggi
Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,6	-0,17	-224%	
Rasio Kewirausahaan	4,15	9,14	220%	Sangat Tinggi
Indeks Ketahanan Pangan	83,5	83,86	100%	Sangat Tinggi

Sumber data: DKUKMPP,DKPKP,DPMPTSP

Capaian PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun) 151% Dengan realisasi sebesar 7,712 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 5,109. Capaian persentase realisasi nilai investasi berada pada capaian -224% Dengan realisasi sebesar - 0,17 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 7,6 sehingga capaian kinerjanya mengalami penurunan yang signifikan Capaian rasio kewirausahaan berada pada predikat sangat tinggi dengan capaian sebesar 220%. Dengan realisasi sebesar 9,14 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 4,15 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 220%. Capaian

persentase Indeks Ketahanan Pangan berada pada predikat sangat tinggi dengan capaian sebesar 100,4%. Dengan realisasi sebesar 83,86 dari target yang ditetapkan sebesar 83,5.



Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Sumber data: DKUKMPP,DKPKP,DPMPTSP

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .22 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 8

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopdagin	47.736.000	21.134.398	44,27
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Diskopdagin	57.174.000	35.567.199	62,21
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskopdagin	10.267.400	3.820.000	37,21
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskopdagin	25.000.000	25.000.000	100,00
5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Diskopdagin	632.756.500	560.115.003	88,52
6	Program Pengembangan Umkm	Diskopdagin	188.869.000	50.049.000	26,50
7	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Diskopdagin	47.736.000	21.134.398	44,27
8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Diskopdagin	554.511.000	554.511.000	100,00
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPKP	10.563.540.272	6.348.070.565	60,09
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPKP	5.050.196.038	4.607.899.887	91,24

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
11	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPKP	630.000.000	234.207.000	37,18
12	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPKP	2.831.800	2.831.800	100,00
13	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPKP	389.849.400	201.564.600	51,70
14	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPKP	33.345.000	23.745.000	71,21
15	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	644.963.851	147.834.094	22,92
16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	680.830.382	578.980.250	85,04
17	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	24.280.000	23.270.000	95,84
18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	41.552.000	13.425.400	32,31
19	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan	800.000.000	470.306.490	58,79
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distan	22.103.560.332	4.853.471.661	21,96
21	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distan	4.810.000.000	1.932.843.303	40,18
22	Program Penyuluhan Pertanian	Distan	1.172.000.000	824.166.823	70,32
23	Program Perizinan Usaha Pertanian	Distan	50.000.000	32.802.500	65,61
Jumlah			48.560.998.975	21.566.750.371	44,41

Sumber data: DKUKMPP,DKPKP,DPMPTSP,Distan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah

1. Belum adanya regulasi pemerintahan daerah tentang Pemberian Fasilitas / Insentif yang dapat memberikan kemudahan dan menarik para investor untuk berinvestasi di daerah,
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain:

1. Optimalisasi kegiatan penanaman modal dan monev permasalahan penanaman modal di Daerah
2. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran

Sasaran 9 :

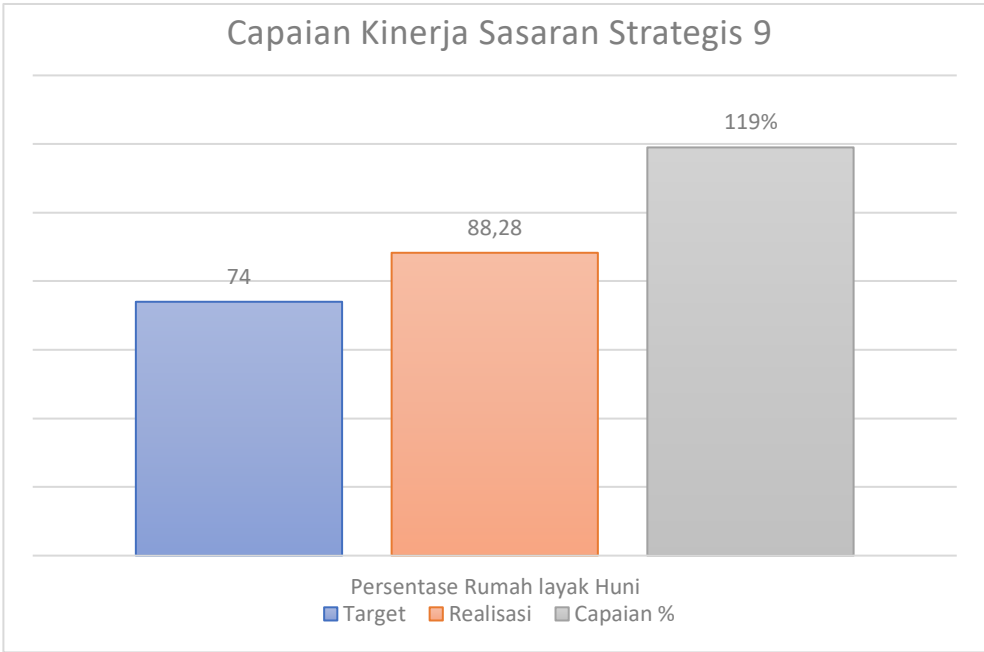
Meningkatnya permukiman layak huni

Tabel 3 .23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Rumah layak Huni	74	88,28	119%	Sangat Tinggi

Sumber data: DPUTRPRKP

Capaian sasaran strategis 9 berkaitan dengan meningkatnya permukiman layak huni. Dengan Persentase Rumah Layak Huni dengan capaian 119% dinilai sangat tinggi. Capaian persentase rumah layak huni berada pada predikat sangat tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan rumah layak huni terkelola dengan cukup baik dan optimal dengan target 2024 74 dan realisasi kinerja 88,28.



Gambar 3. 8 Capaian Kinerja Sasaran strategis 9

Sumber: DPUTRPRKP

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .24 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 9

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	DPUTRPRKP	500.000.000	34.560.000	6,9%
Jumlah			500.000.000	34.560.000	6,9%

Sumber data : DPUTRPRKP

Target sasaran meningkatnya permukiman layak huni tercapai dengan sangat baik disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. pelaksanan kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan menunjang dengan kegiatan.

- 2. didukung dengan sarana prasarana yang mendukung.
- 3. kinerja pegawai yang menangani kegiatan masing-masing dilakukan dengan tepat

Sasaran 10 :

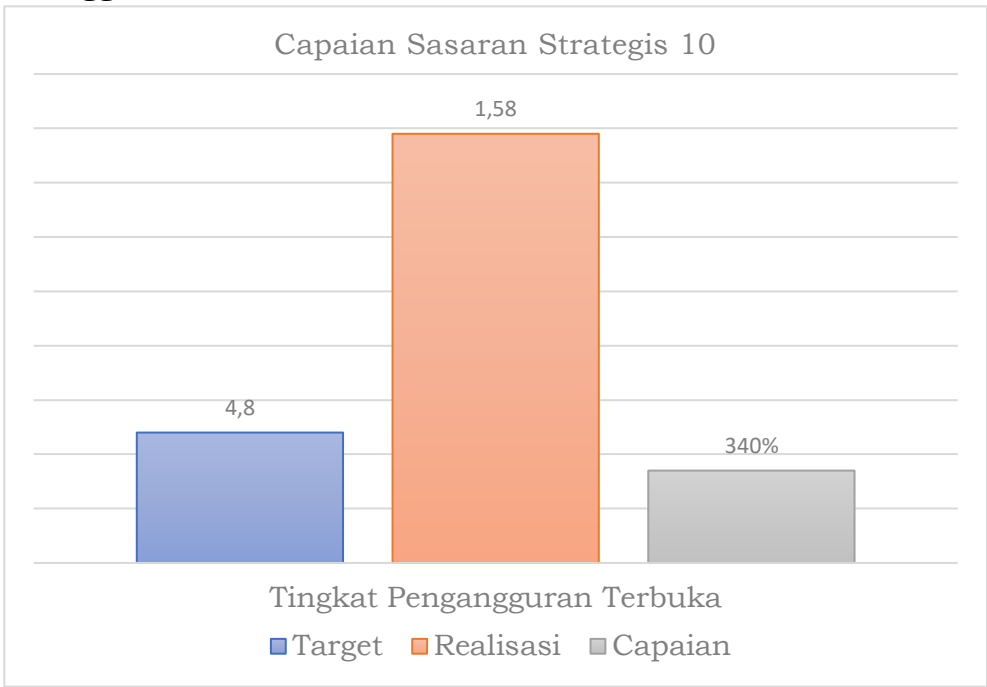
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja

Tabel 3 .25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80-4,05	1,58	340%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Ketenagakerjaan

Capaian sasaran strategis 10 berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang terpenuhi dengan capaian 340% dinilai sangat tinggi.



Gambar 3 .97 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .26 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 10

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	105.574.370	44.004.090	41,68
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	635.522.570	563.906.950	88,73

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	235.993.358	17.427.000	7,38
4	Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan	769.068.400	498.091.500	64,77
5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	105.574.370	44.004.090	41,68
Jumlah			1.851.733.068	1.167.433.630	63,05

Sumber data :Dinas Ketenagakerjaan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah

1. Minat perusahaan di Kabupaten Pangandaran masih kurang dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja.
2. Terdapat satu sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian program yang hanya terpenuhi sebanyak 63% dari total capaian program ini.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran adalah

1. Melaksanakan bimbingan terhadap perusahaan dalam Menyusun Rencana Tenaga Kerja.
2. Memaksimalkan setiap kegiatan sehingga didapat capaian yang maksimal pula dan memberikan kontribusi lebih terhadap capaian program tersebut.

Sasaran 11 :

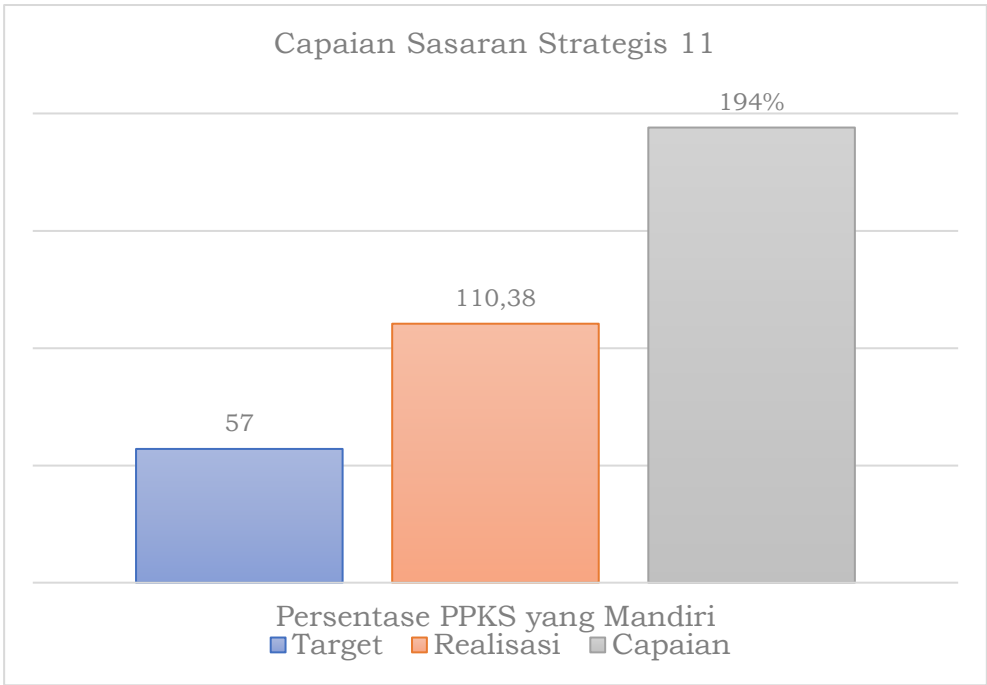
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS

Tabel 3 .27 Capaian Kinerja Sasaraan Strategis 11

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase PPKS yang Mandiri	57	110,38	194%	Sangat Tinggi

Sumber data: DinsosPMD

Capaian sasaran strategis 11 berkaitan dengan Meningkatkan cakupan penanganan PPKS. Dengan indikator Persentase PPKS yang Mandiri yang terpenuhi dengan capaian 194% dinilai sangat tinggi. Dengan target tahun 2024 57 dan realisasi 110,38 dengan capaian 194%



Gambar 3 .10 Capaian Kinerja Sasaran strategis 11

Sumber: DinsosPMD

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .28 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 11

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsospmd	113.000.000	54.000.000	47,79
2	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsospmd	1.339.278.785	207.522.000	15,50
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsospmd	3.160.151.210	1.881.216.810	59,53
4	Program Penanganan Bencana	Dinsospmd	659.717.752	332.751.000	50,44
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsospmd	98.058.347	46.010.000	46,92
			5.370.206.094	2.521.499.810	46,95

Sumber data :DinsosPMD

Ketercapaian target sasaran meningkatnya cakupan penanganan PPKS Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat melalui program bantuan sosial yang tetap sasaran.

Misi 5:

Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Tujuan 7 :
Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Tabel 3 .29 Capaian Kinerja Tujuan 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	BB 72,25	BB 76,32	106%	Sangat Tinggi

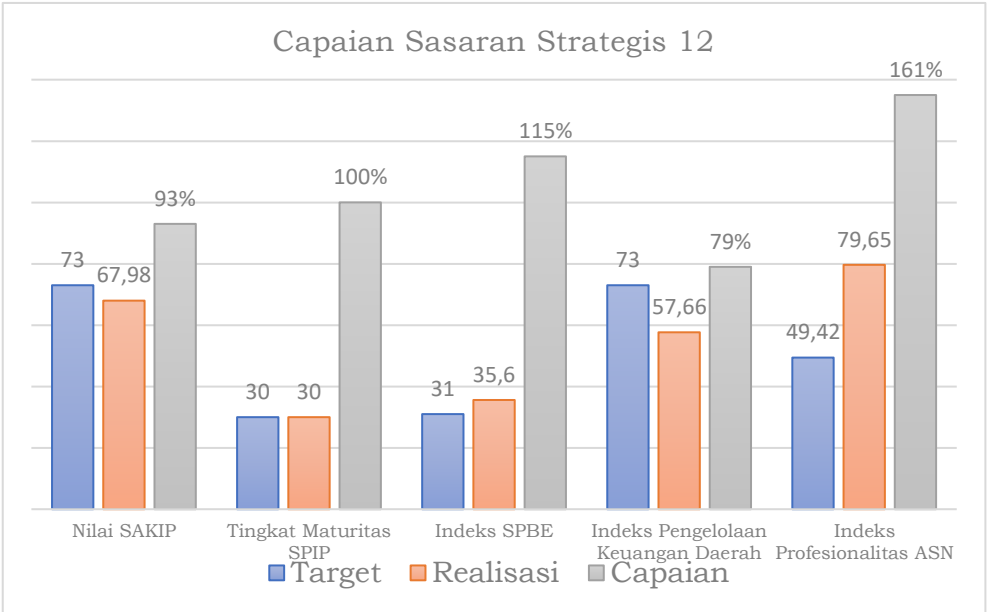
Sumber data: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, dengan focus pada aspek kelembagaan, tata kelola dan SDM aparatur.

Sasaran 12 :
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tabel 3 .30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai SAKIP	73	67,98	93%	Sangat Tinggi
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	Sangat Tinggi
Indeks SPBE	3,1	3,56	115%	Sangat Tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73	57,66	79%	Tinggi
Indeks Profesionalitas ASN	49,42	79,65	161%	Sangat Tinggi

Sumber data: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah
Capaian sasaran strategis 12 berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan indikator nilai SAKIP dengan capaian 93% dinilai Sangat Tinggi. Dengan target tahun 2024 73 dan realisasi 67,98 dengan capaian 93% dan Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian 100% dinilai sangat tinggi dengan target tahun 2024 3 dan realisasi 3 sedangkan Indeks SPBE dengan capaian 115% dinilai sangat tinggi dengan target 3,1 dan realisasi 3,56 dan untuk Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian 161% dinilai sangat tinggi dengan target 49,42 dan realisasi 79,65 sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian 79% dinilai tinggi dengan target 73 dan realisasi 57,6.



Gambar 3 .8 Capaian kinerja sasaran strategis 12

Sumber: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .31 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 12

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	2.212.140.265	1.535.821.638	69,43
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	131.324.0000	12.175.200	9,27
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO	392.191.000	210.344.000	53,63
4	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO	34.250.000	16.850.000	49,20
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO	73.214.900	27.270.100	37,25
6	Program Penyelenggaraa Statistik Sektoral	DISKOMINFO	46.000.000	9.000.000	19,57
7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT	957.863.300	455.898.700	47,60
8	Program Penyelenggaraa Pengawasan	INSPEKTORAT	2.653.071.250	947.645.001	35,72
9	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	2.462.848.652	1.589.770.273	64,55
10	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA	2.432.975.030	1.933.036.034	79,45
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	3.224.749.850	3.002.345.497	93,10
12	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	222.056.478.794	106.826.708.716	48,11
13	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA	3.419.354.152	2.018.124.449	59,02
JUMLAH			241.278.377.193	118.584.989.608	49,15

Sumber data: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Dampak pandemi covid-19 yang masih dirasakan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran sehingga BKPSDM perlu mengefisiensi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan menjadi minimum
- 2) Kurangnya pembaruan kondisi cenderung sama dengan sebelumnya sehingga tidak mendorong perbaikan nilai SPBE

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- 1) Menghimbau kepada ASN Kabupaten Pangandaran untuk mengikuti Diklat/Seminar/Webinar/workshop yang bersertifikat untuk mengembangkan/menambah nilai kompetensi ASN
- 2) Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap dalam aplikasi IP ASN dan SAPK
- 3) Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan
- 4) Kurangnya pembaruan kondisi cenderung sama dengan sebelumnya sehingga tidak mendorong perbaikan nilai

Sasaran 13 :

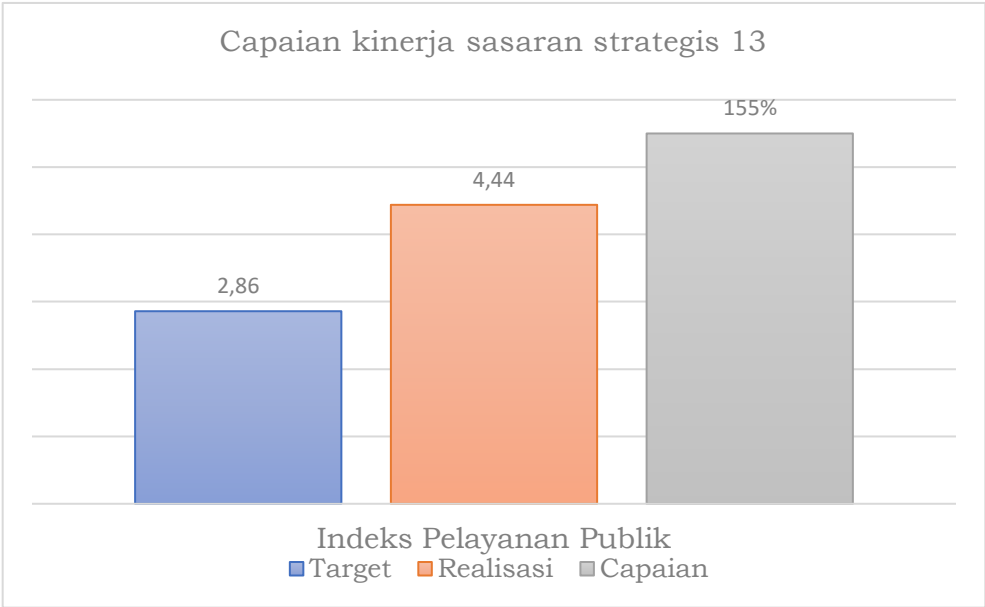
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif

Tabel 3 .32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pelayanan Publik	2,86-2,95	4,44	155%	Sangat Tinggi

Sumber data: DPMPTSP, Disdukcapil

Capaian sasaran strategis 13 berkaitan dengan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif. Dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang terpenuhi dengan capaian 155% dinilai sangat baik. Dengan target tahun 2024 2,86-2,95 dan realisasi 4,44 dengan capaian 155%



Gambar 3 .12 Capaian kinerja sasaran strategis 13

Sumber: DPMPTSP, Disdukcapil

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .33 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 13

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DPMPTSP DAN DISDUKCAPIL	113.200.000	23.500.000	20,76
Jumlah			113.200.000	23.500.000	20,76

Sumber data : DPMPTSP, Disdukcapil

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- 2) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masih belum dilakukan secara periodik oleh masing-masing OPD, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- 1) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- 2) Kebijakan setiap OPD melakukan survei kepuasan masyarakat pada setiap layanannya secara periodik dan melaporkan ke sekretaris daerah dan mempublikasikan hasil akhirnya (IKM).

Misi 6:

Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Tujuan 6 :

Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana

Tabel 3 .34 Capaian Kinerja Tujuan 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	79,05	85,7	108%	Sangat tinggi

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran 14 :

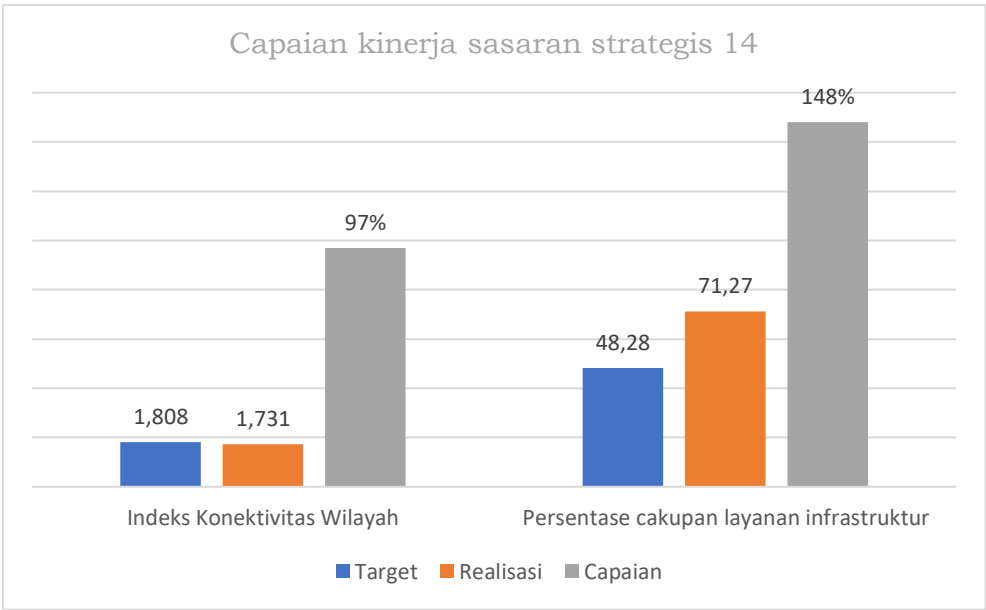
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah

Tabel 3 .35 Capaian Kinerja Sasaran strategis 14

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Konektivitas Wilayah	1,808	1,731	96%	Sangat tinggi
Persentase cakupan layanan infrastruktur	48,28	71,27	148%	Sangat tinggi

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian sasaran strategis 14 berkaitan dengan Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah. Dengan indikator Indeks Konektivitas Wilayah yang terpenuhi dengan capaian 96% dinilai sangat tinggi dengan target 1,808 dan realisasi 1,731 dengan capaian 96% dan Indikator Persentase cakupan layanan infrastruktur yang terpenuhi dengan capaian 148% dinilai sangat tinggi dengan target tahun 2024 48,28 dan realisasi 71,27.



Gambar 3 .13 Capaian kinerja sasaran strategis 14

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .36 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 14

N o	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTRPRKP	144.564.799.205	131.454.410.481	90,93
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUTRPRKP	15.661.118.400	9.833.442.125	62,79
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTRPRKP	9.076.722.500	6.909.787.100	76,13
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTRPRKP	19.175.235.431	15.816.747.320	82,49
6	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUTRPRKP	16.147.135.780	12.447.904.925	77,09
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUTRPRKP	1.637.707.164	1.161.307.164	70,91
Jumlah			213.944.689.195	180.838.603.754	84,53

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Indeks Konektivitas Wilayah tidak tercapai karena tidak terdapat pembangunan ruas jalan baru, mengingat kondisi fiska daerah dan tidak menjadi prioritas pembangunan 2024.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Mengoptimalkan peningkatan jalan eksisting dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan inovatif untuk pembangunan infrastruktur jalan baru.

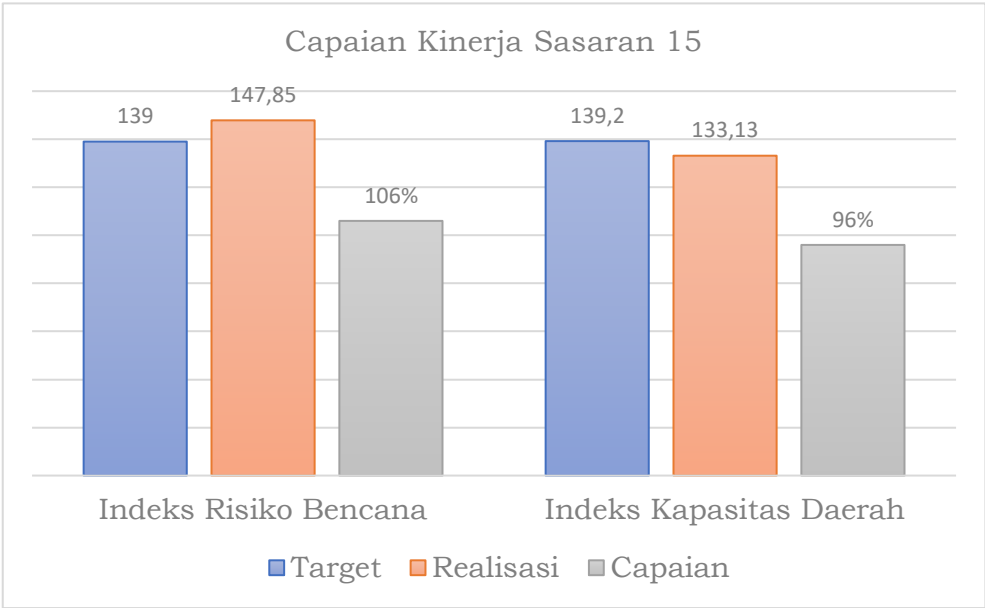
Sasaran 15 :

Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah

Tabel 3 .37 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Risiko Bencana	139	147,85	106%	Sangat Tinggi
Indeks Kapasitas Daerah	139,2	133,13	96%	Sangat Tinggi

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar 3 .9 capaian kinerja sasaran strategis 15

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .38 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 15

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	4.441.066.016	3.297.641.131	74,25
Jumlah			4.441.066.016	3.297.641.131	74,25

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Perhitungan Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurunnya target, realisasi, dan capaian kinerja disebabkan oleh meningkatnya ancaman bencana di Kabupaten Pangandaran yaitu potensi gempa bumi dan tsunami Megathrust dengan magnitude 8,7 SR.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Mengoptimalkan mitigasi bencana dan penguatan kapasitas daerah

Sasaran 16 :

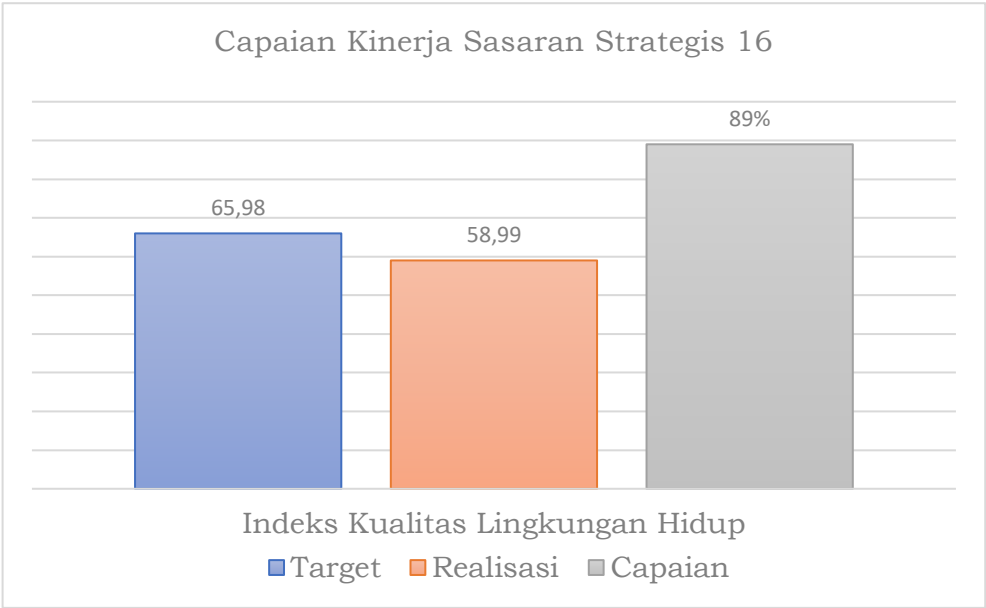
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 3 .39 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,98	58,99	89%	Tinggi

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Capaian sasaran strategis 16 terkait dengan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 89% pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target yang ditentukan sebesar 65,98 terealisasi sebesar 58,99 hal tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga dapat menunjukkan bahwa kinerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup berjalan optimal dan berhasil.



Gambar 3 10 capaian kinerja sasaran strategis 16
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .40 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 16

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK	407.125.485	373.500.000	91,74
2	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHK	10.321.000	10.321.000	100,00
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHK	1.486.863.357	1.421.062.233	95,57
6	Program Pengelolaan Persampahan	DLHK	4.840.826.910	3.685.674.547	76,14
Jumlah			14.427.107.467	8.705.562.419	60,34

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Adanya penundaan pembayaran kegiatan untuk paket

pengadaan Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Paket kegiatan yang belum dibayarkan akan dibayarkan di tahun 2024 (hutang). Pelaksanaan kegiatan dioptimalkan dengan Anggaran yang tersedia.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui trend pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .41 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	Indeks Kesalehan Sosial	61,00	81,94	134%	62,00	Nilai belum rilis	0%
2.	S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2344	0,4975	212%	0,2579	0,4024	156%
3		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	82,5	59,7	72%	85	90,6	107%
4	S2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7691	0,8413	109%	0,7693	0,8493	110%
5	T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	30	62	207%	40	62	155%
6	S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	630.000	1.998.592	317%	690.000	2.006.906	291%
7	T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	69,12-69,59	70,57	101%	69,12-69,59	71,03	103%
8		Indeks Pembangunan Gender	90,01	90,2	100%	90,06-90,09	Nilai belum rilis	0%
9	S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,28	84,43	105%	80,68	84,78	105%
10		Indeks Pendidikan	60,02	60,97	102%	60,33	61,19	101%
11		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,16	19,62	102%	19,61	77,16	393%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
12	S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	100	50	50%	40	47	118%
13	S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,73%	0,67%	92%	0,57	0,61	107%
14	S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,58%	76,09%	102%	74,59	Nilai belum rilis	0%
15	T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,26	96%	5,51-5,90	5,12	93%
16		Persentase Penduduk Miskin	6,75	8,98	133%	5,90-6,40	8,75	148%
17	S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,923	Nilai belum rilis	-	5,109	7,712	151%
18		Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,24	-13,59	-188%	7,6	-0,17	-224%
19		Rasio Kewirausahaan	3,95	24,39	617%	4,15	9,14	220%
20		Indeks Ketahanan Pangan	82	83,57	102%	83,5	83,86	100,43 %
21	S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74	88,26	119%	74	88,28	119,3%
22	S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90-4,25	1,52	280%	4,80-4,00	1,58	304%
23	S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	47	112,14	239%	57	110,38	194%
24	T.5 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60-70)	BB (73,72)	105%	BB 72,25	BB 76,32	106%
25	S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	B (70)	B (67,99)	97%	73	67,98	93%
26		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	3	3	100%
27		Indeks SPBE	3,05	3,53	116%	3,1	3,56	115%
28		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,00	Nilai belum rilis dari Kemendagri	-	73	57,664	79%
29		Indeks Profesionalitas ASN	45,92	55,89	122%	49,42	79,65	161%
30	S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	2,66-2,75	4,07	148%	2,86-2,95	4,44	155%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
31	T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	81	Nilai belum rilis	-	79,05	85,7	108%
32	S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,788	1.731	97%	1,808	1,731	96%
33		Persentase cakupan layanan infrastruktur	44,94	54,98	122%	48,28	71,27	148%
34	S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	141	147,85	105%	139	147,85	106%
		Indeks Kapasitas Daerah	142	137,36	97%	139,2	133,13	96%
36	S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,76	64,44	98%	65,98	58,99	89%

Sumber: Pangandaran dalam Angka 2024, Bappeda, Sekretariat Daerah.

Berdasarkan penjelasan pada tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2023 dan 2024, terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, capaiannya meningkat menjadi 393% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian 102%. selain itu Indeks Profesionalitas ASN juga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 161% di tahun 2024 dari 122% di tahun 2023. Indikator lainnya yang mengalami peningkatan adalah Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2024 sebesar 148% dari 122% di tahun 2023.

Salah satu indikator dengan capaian tertinggi adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang mengalami peningkatan sebesar 291% yaitu dengan capaian 393% pada tahun 2024 dari 102% pada tahun 2023.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD dilakukan untuk mengetahui pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2024 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .42 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	-	64,00	-
2.	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,4024	0,3048	132%
3.	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	90,6	90	101%
4.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8493	0,7770	109%
5.	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	62	60	103%
6.	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	2.006.906	750.000	268%
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,03	70,53-71,00	101%
8.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	90,16-90,20	-
9.	Indeks Kesehatan	Indeks	84,78	81,40-81,50	104%
10.	Indeks Pendidikan	Indeks	61,19	60,71-61,00	101%
11.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	77,16	20,24	381%
12.	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	47	130	36%
13.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,61	0,70-0,71	86%
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	-	75,98%	-
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,12	6,21-6,60	82%
16.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,75	4,50-5,57	194%
17.	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan,Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	7,712	5,520	140%
18.	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	-0,17	8,38	-2%
19.	Rasio Kewirausahaan	Rasio	9,14	4,50	203%
20.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,86	81,12	103%
21.	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	88,28	75	117%
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,58	4,60-3,50	340%
23.	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	110,38	40.63	272%
24.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB 76,32	A 79-84	97%
25.	Nilai SAKIP	Nilai	67,98	81,25-85,00	84%
26.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
27.	Indeks SPBE	Indeks	3,56	3,25	110%
28.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	57,664	75.00	77%
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,65	56,42	141%
30.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,44	3,06-3,15	145%
31.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	85,7	80,00	107%
32.	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,731	1,865	93%
33.	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	71,27	54,64	130%
34.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	147,85	135	110%
35.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	133,13	136,44	98%
36.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99	66,43	89%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 21 Indikator yang realisasinya sudah mencapai target akhir RPJMD, seperti Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani, Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa, Indeks Desa Membangun, Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata, Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Persentase Penduduk Miskin, PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri, Rasio Kewirausahaan, Indeks Ketahanan Pangan, Persentase PPKS yang Mandiri, Tingkat Maturitas SPIP, Indeks SPBE, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pelayanan Publik, Persentase cakupan layanan infrastruktur, Persentase Rumah Layak Huni dan Indeks Risiko Bencana. Kemudian terdapat 8 indikator utama yang sudah mendekati target akhir RPJMD, karena capaian dari 3 indikator ini sudah lebih dari 90%. Sedangkan, untuk 7 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD selanjutnya dapat tercapai.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 .43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi/ Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pangandaran	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Realisasi Nasional
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	-	-	-
2.	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,4024	-	-
3.	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	90,6	-	-
4.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8493	0,08012	-
5.	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	62	-	-
6.	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	2.006.906	-	-
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,03	74,92	75,02
8.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	-	-
9.	Indeks Kesehatan	Indeks	84,78	-	-
10.	Indeks Pendidikan	Indeks	61,19	-	-
11.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	77,16	72,76	73,52
12.	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	47	-	-
13.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,61	1,13	1,11
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	-	71,74	76,90
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,12	4,95	5,03
16.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,75	7,46	8,57
17.	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	7,712	-	-
18.	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	-0,17	-	-
19.	Rasio Kewirausahaan	Rasio	9,14	-	-
20.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,86	-	-
21.	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	88,28	56,25	-
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,58	6,75	7,47
23.	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	110,38	-	-
24.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB 76,32	A 93,08	-
25.	Nilai SAKIP	Nilai	B 67,98	A 88,89	-
26.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	-
27.	Indeks SPBE	Indeks	3,56	4,73	3,12
28.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	57,664	80,879	-
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,65	94,03	-
30.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,44	4,76	-
31.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	85,7	-	-
32.	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,731	-	-
33.	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	71,27	-	-
34.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	147,85	114,15	115,89
35.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	133,13	-	-
36.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99	66,02	73,07

Sumber data: Statistik Indonesia, dan Jawa Barat Dalam Angka, Pangandaran Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, yakni perbandingan antara realisasi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan Nasional diketahui bahwa capaian rata-rata pada setiap Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran terlihat lebih baik dibandingkan capaian indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan Indikator Kinerja Utama Nasional, dimana capaian Indikator Kinerja Utama Nasional lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Provinsi. Akan tetapi masih terdapat data Indikator capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional masih belum diketahui karena belum adanya publikasi.

3.2.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3 .44 Capaian Anggaran Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Anggaran 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	56.184.514.136	54.191.016.348	96,45%
S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	54.090.156.926	52.553.639.203	97,16%
S2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	2.094.357.210	1.637.377.145	78,18%
T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	76.299.576.078	52.688.211.808	69,05%
S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	76.299.576.078	52.688.211.808	69,05%
T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	386.196.985.790	228.329.378.456	59,12%
S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	366.081.478.230	211.121.513.735	57,67%
S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	13.232.376.924	11.786.491.524	89,07%

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Anggaran 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	6.326.778.936	5.202.674.369	82,23%
S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	556.351.700	218.698.828	39,31%
T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	56.282.938.137	25.290.243.811	44,93%
S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	48.560.998.975	21.566.750.371	44,41%
S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	500.000.000	34.560.000	6,9%
S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	1.851.733.068	1.167.433.630	63,05%
S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	5.370.206.094	2.521.499.810	46,95%
T.5 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	241.391.577.193	118.608.489.608	49,14%
S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	241.278.377.193	118.584.989.608	49,15%
S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	113.200.000	23.500.000	20,76%
T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	232.812.862.678	192.841.807.304	82,83%
S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	213.944.689.195	180.838.603.754	84,53%
S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	4.441.066.016	3.297.641.131	74,25%
S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.427.107.467	8.705.562.419	60,34%

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa capaian anggaran tahun 2024 mencapai 64,07%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.343.829.174.670 dari total anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.097.336.908.024. Secara rinci, pada tujuan 1 capaian anggarannya mencapai 99,45%, yang mana anggaran yang

teralisasi adalah sebesar Rp.54.191.016.348 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 56.184.514.136. Pada tujuan 2, capaian anggarannya adalah sebesar 69,05%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 52.668.211.808 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 76.229.576.078. Pada tujuan 3, capaian anggarannya adalah sebesar 59,12%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.228.329.378.456 dari jumlah anggaran sebesar Rp.386.196.985.790. Pada tujuan 4, capaian anggarannya adalah sebesar 44,93%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 25.282.938.137 dari jumlah anggaran sebesar 56.282.938.137 Pada tujuan 5, capaian anggarannya adalah sebesar 49,14%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.118.608.489.608 dari jumlah anggaran sebesar Rp.241.391.577.193. Pada tujuan 6, capaian anggarannya adalah sebesar 82,83%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.192.841.807.304 dari jumlah anggaran sebesar Rp.232.812.862.678.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran

Analisis data efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 .45 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2024 (%)	Efisiensi	Efisien/ Tidak Efisien
T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	-	96,45%	-	-
S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	132%	97,16%	34,84%	EFISIEN
S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	110%	78,18%	31,82%	EFISIEN
T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	155%	69,05%	85,95%	EFISIEN
S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	291%	69,05%	221,95%	EFISIEN
T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	103%	59,12%	43,88%	EFISIEN
S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	150%	57,67%	92,33%	EFISIEN
S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	118%	89,07%	28,93%	EFISIEN
S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	107%	82,23%	24,77%	EFISIEN
S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	-	39,31%	-	-

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2024 (%)	Efisiensi	Efisien/ Tidak Efisien
T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	121%	44,93%	76,07%	EFISIEN
S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	61,86%	44,41%	17,45%	EFISIEN
S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	119,3%	6,91%	112,39%	EFISIEN
S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	304%	63,05%	240,95%	EFISIEN
S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	195%	46,95%	148,05%	EFISIEN
T.5Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	106%	49,14%	56,86%	EFISIEN
S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	110%	49,15%	60,85%	EFISIEN
S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	155%	20,76%	134,24%	EFISIEN
T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	85,7%	82,83%	2,87%	EFISIEN
S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	170%	84,53%	85,47%	EFISIEN
S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	154%	74,25%	79,75%	EFISIEN
S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	89%	60,34%	28,66%	EFISIEN

Sumber: Bappeda, Sekretariat Daerah, Capaian IKU Kabupaten Pangandaran

BAB IV
PENUTUP

4.1 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pangandaran disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Pangandaran yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap Pencapaian Indikator, Sasaran Strategis, dan Capaian Misi. Penyusunan LKjIP juga merupakan sebuah pertanggungjawaban pencapaian Visi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”** sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 6 misi yakni :

- Pertama** : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
- Kedua** : Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan
- Ketiga** : Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
- Keempat** : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
- Kelima** : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
- Keenam** : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Realisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Demikian pula pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyusun RKPD yang berisi usulan strategi dan program/kegiatan dengan mengacu pada indikator dan target mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa 30 Indikator atau sebesar 83% dari seluruh IKU memiliki capaian dengan kategori sangat Tinggi, indikator dengan kategori Tinggi sebanyak 1 indikator atau sebesar 2,8% dan terdapat 2 indikator dengan capaian sangat rendah atau 5,6% dari total keseluruhan indikator. Selanjutnya masih terdapat 8,3% Indikator yang belum terdapat data dan capaiannya.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan terus selalu mengupayakan terjadinya percepatan pembangunan dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar target akhir RPJMD dapat tercapai. Dengan tercapainya target akhir di RPJMD nantinya, diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan visi dan misi yang telah tertuang pada periode tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi akan terus dilakukan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka menerapkan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, seluruh Perangkat Daerah harus dapat bersinergi dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pangandaran, 24 Maret 2025
BUPATI PANGANDARAN,

Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Sumber Data/ Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	
Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	N/A	0,2250	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	Satpol PP
	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	N/A	77,25	80	82,5	85	87,5	90	Bakesbangpol
Meningkatnya pemberda-yaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7374	0,7251	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	Dinsos PMD /Kemendesa PDTT
	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	N/A	10	20	30	40	50	60	Disparbud
Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000	Disparbud
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,06	68,07-68,49	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	BPS
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,78	89,72-89,90	89,91-89,98	89,99-90,05	90,06-90,09	90,10-90,15	90,16-90,20	BPS
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	Indeks	79,08	79,09-79,60	79,61-80,10	80,11-80,50	80,51-81,00	81,01-81,40	81,40-81,50	Dinkes/BPS
	Indeks Pendidikan	Indeks	59,33	59,34-59,50	59,51-59,90	59,61-60,20	60,21-60,50	60,51-60,70	60,71-61,00	Disdikpora/ BPS
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	16,37	17,85	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	Dispusip
Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	N/A	100	100	100	110	120	130	Disdikpora
Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,76	0,75-0,76	0,74-0,75	0,73-0,74	0,72-0,73	0,71-0,72	0,70-0,71	DKBP3A/ BPS
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,57	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	DKBP3A/ BPS

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Sumber Data/ Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-0,05	3,30- 4,50	4,60- 5,20	5,21- 5,50	5,51- 5,90	5,91- 6,20	6,21- 6,60	BPS
	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,99	8,40- 8,70	7,00- 7,55	6,40- 7,00	5,90- 6,40	5,18- 5,90	4,50- 5,57	Dinsos PMD /BPS
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	4,597	4,825	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	GABUNGAN
	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	6,57	6,35	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	DPMPTSP
	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,54	3,62	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	Disperindagkop UMKM
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,99	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	DKPKP
Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	73	73	74	74	74	74	75	DPUTRPKP
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	5,08	5,07 - 5,01	5,00- 4,50	4,90- 4,25	4,80- 4,00	4,70- 3,75	4,60- 3,50	Disnakertrans/BPS
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	27	30	37	47	57	67	77	Dinsos PMD
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	54-58	59-63	64-68	69-73	74-78	79-84	Setda/ Bag. Organisasi
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	Nilai	B	66,90- 67,15	67,25- 69,00	69,25- 72,00	72,25- 76,00	76,25- 81,00	81,25- 85,00	Setda/ Bag. Organisasi (Kemenpan RB)
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
	Indeks SPBE	Indeks	3,02	2,38	3,04	3,05	3,1	3,2	3,25	Diskominfo
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	BPKD
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	38,92	39,50	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	BKPSDM
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,50- 2,60	2,61- 2,65	2,66- 2,75	2,86- 2,95	2,96- 3,05	3,06- 3,15	Setda/ Bag. Organisasi
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	77,16	77,63	78,11	78,58	79,05	79,53	80,00	DPUTRPKP
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,635	1,654	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	Dishub
	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	37,64	38,95	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	DPUTRPKP
Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	145	142	143	141	139	137	135	BPBD
	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	145,45	144,00	143,4	142,00	139,2	137,84	136,44	BPBD
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,22	65,32	65,54	65,76	65,98	66,20	66,43	DLHK



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KABUPATEN PANGANDARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. JEJE WIRADINATA

Jabatan : BUPATI PANGANDARAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangandaran, 23 Januari 2025


BUPATI PANGANDARAN,
H. JEJE WIRADINATA

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Taqwa Dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragam			
1.	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2814
		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	87,5
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7696
Misi 2: Mengembangkan Wisata Dengan Memperluas Akses Dan Penataan Berkelanjutan			
2.	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	720.000
Misi 3: Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan Dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Serta Peningkatan Kompetensi Lulusan			
3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	81,01
		Indeks Pendidikan	60,51
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,95
	Meningkatkan Jumlah Pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	120
	Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,60
Misi 4: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
4.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,310
		Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,98
		Rasio Kewirausahaan	4,30
		Indeks Ketahanan Pangan	84,00
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74
	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,70 – 3,75
	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel			
5.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	76.25-81,00
		Tingkat Maturitas SPIP	3
		Indeks SPBE	3,2
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,00
		Indeks Profesionalitas ASN	52,92
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	2,96 – 3,05
Misi 6: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan			
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,846
		Persentase cakupan layanan infrastruktur	51,47
	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	137
		Indeks Kapasitas Daerah	137,84
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,20

Pangandaran, 22 Januari 2025

BUPATI, PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	885.376.744,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	490.459.750,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	18.500.000,00
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	54.408.500,00
5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	692.969.785,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.560.611.900,00
7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.108.756.800,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.511.879.814,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	285.533.258.444,00
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	550.000.000,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.390.592.814,00
12	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.201.232.300,00
13	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	480.909.528,00
14	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.267.257.102,00
15	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.490.000,00
16	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.917.100,00
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.556.000,00
18	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	966.615.885,00
19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	79.313.000,00
20	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	63.486.575,00
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.382.889.000,00
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.271.529.000,00
23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	56.350.944,00
24	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	178.848.704,00
25	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	268.135.878,00
26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	105.000.000,00
27	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	66.943.826,00
28	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	26.516.984,00
29	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.301.500,00
30	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	56.075.000,00
31	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	52.685.000,00
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	82.765.000,00
33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	94.933.081.768,00
34	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	325.300.000,00
35	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	249.738.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
36	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	292.349.950,00
37	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	279.878.853,00
38	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	71.949.694,00
39	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	106.009.240,00
40	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	259.308.000,00
41	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	350.085.368,00
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	15.900.000,00
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	17.074.000,00
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21.803.200,00
45	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	48.181.700,00
46	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	9.997.800,00
47	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	24.887.500,00
48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	44.889.050,00
49	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.950.817.650,00
50	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	59.005.500,00
51	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	9.436.688,00
52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	9.308.500,00
53	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.967.950,00
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	677.479.075,00
55	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.993.688.107,00
56	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.400.000,00
57	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	44.007.500,00
58	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	6.157.300,00
59	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	66.415.500,00
60	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	223.797.166,00
61	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.091.750,00
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	154.360.000,00
63	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	103.861.055,00
64	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.372.069.845,00
65	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.399.133.700,00
66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.065.845.000,00
67	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	500.000.000,00
68	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.582.056.000,00
69	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.900.000.000,00
70	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	100.000.000,00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.070.872.938,00
72	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.200.000.000,00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	212.635.860.885,53
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	85.274.100,00
75	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	91.518.255.980,00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100.000.000,00
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.320.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	750.000.000,00
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	119.194.000,00
80	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.343.265.650,00
81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	403.347.619,00
82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	50.614.955,00
83	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	38.187.959,00
84	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.365.500,00
85	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	49.309.800,00
86	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.247.397.352,00
87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	495.583.532,00
88	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	49.105.135,00
89	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	174.817.150,00
90	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	774.737.108,00
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.000.000,00
92	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	262.790.000,00
93	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.706.880,00
94	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	872.575.000,00
95	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.104.161.500,00
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.928.416.500,00
97	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.259.338.000,00
98	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	149.885.000,00
99	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.027.024.161,00
100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.006.999.520,00
101	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	80.000.000,00
102	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.000.000,00
103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.100.000.000,00
104	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.754.218.850,00
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200.350.000,00
106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	249.903.236,00
107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	725.916.496.132,47

Pangandaran, 23 Januari 2025

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

